



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**IMPLEMENTASI PROGRAM POS PELAYANAN TERPADU
(POSYANDU) DI DESA TANJUNG KECAMATAN
KOTO KAMPAR HULU**

SKRIPSI

*Diajukan Sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Program Studi
Administrasi Negara (S1) Pada Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau*



UIN SUSKA RIAU

OLEH:

REVA LINA

NIM : 12270521443

**PROGRAM STUDI ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU**

2026



LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Al-Qasim Riau

Hak Cipta
 Nama
 NIM
 Program Studi
 Fakultas
 Judul

: Reva Lina
 : 12270521443
 : Administrasi Negara
 : Ekonomi dan Ilmu Sosial
 : Implementasi Program Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) Di Desa
 Tanjung Kecamatan Koto Kampar Hulu.

DISETUJUI OLEH:

Dosen Pembimbing

Dr. Kamaruddin, S.Sos, M.Si
NIP. 19790101 200710 1 003

MENGETAHUI

DEKAN
Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial



Dr. Desri Milla, S.E., M.M., Ak
NIP. 19740412 200604 2 002

KETUA PROGRAM STUDI
Administrasi Negara

Dr. Khairunsvah Purba, S.Sos., M.Si
NIP. 19781025 200604 1 002

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : Reva Lina
 NIM : 12270521443
 Jurusan : Administrasi Negara
 Fakultas : Ekonomi dan Ilmu Sosial
 Judul Skripsi : Implementasi Program Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) Di Desa Tanjung Kecamatan Koto Kampar Hulu.
 Tanggal Ujian : 21 April 2026

Tim Penguji

Ketua Penguji
Dr. Rodi Wahyudi, S. Sos., M. Soc., Sc
 NIP. 19830409 202321 1 016

Penguji I
Muslim, S.Sos.,M.Si
 NIP. 19820205 201503 1 00 2

Penguji II
Dr. Kamaruddin, S.Sos, M.Si
 NIP. 19790101 200710 1 003

Sekretaris
Virna Museliza, S.E., M.Si
 NIP. 19660827 202321 2 005

UIN SUSKA RIAU

- Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Lampiran Surat :

Nomor : Nomor 25/2021

Tanggal : 10 September 2021

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : REVA LINA
 NIM : 12270521993
 Tempat/Tgl. Lahir : Tanjung, 09 Januari 2009
 Fakultas/Pascasarjana : Ekonomi Dan Ilmu Sosial
 Prodi : Administrasi Negara
 Judul Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya*:
Inplementasi Program Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu)
Di Desa Tanjung Kecamatan Koto Kampar Hulu

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan ~~Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya*~~ dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu ~~Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya*~~ saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan ~~Disertasi/Thesis/Skripsi/(Karya Ilmiah lainnya)*~~ saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikianlah Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 09 Mei 2021
 Yang membuat pernyataan


 REVA LINA
 NIM : 12270521993



* ~~plagiat~~ salah satu sasuai jenis karya tulis

Sate Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

**IMPLEMENTASI PROGRAM POS PELAYANAN TERPADU
(POSYANDU) DI DESA TANJUNG KECAMATAN KOTO
KAMPAR HULU**

Oleh:
Reva Lina
NIM. 12270521443

Program Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) merupakan program pelayanan kesehatan dasar berbasis masyarakat yang dikembangkan oleh pemerintah untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi program Pos Pelayanan Terpadu Posyandu (Posyandu) di Desa Tanjung Kecamatan Koto Kampar Hulu dan apa saja faktor penghambat implementasi program Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) di Desa Tanjung Kecamatan Koto Kampar Hulu. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Pada penelitian ini menggunakan teori Implementasi kebijakan dari George Edward III yang mencakup empat indikator: komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Program Posyandu di Desa Tanjung telah berjalan, namun belum sepenuhnya optimal. Indikator disposisi menunjukkan hasil yang cukup baik, terlihat dari sikap kader dan tenaga kesehatan yang ramah serta didukung dengan pemberian insentif yang rutin. Sementara itu, indikator komunikasi, sumber daya, dan struktur birokrasi masih perlu ditingkatkan, terutama terkait penyampaian informasi yang belum merata, keterbatasan kualitas sumber daya manusia dan fasilitas, serta belum optimalnya penerapan SOP dan koordinasi antar pelaksana. Selain itu, faktor penghambat dalam pelaksanaan program meliputi keterbatasan anggaran, sarana dan prasarana, kompetensi kader, kurangnya sosialisasi, jadwal pelaksanaan yang tidak menetap, serta sistem pencatatan yang masih manual.

Kata Kunci: Implementasi, Kebijakan Publik, Posyandu

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRACT

IMPLEMENTATION OF THE INTEGRATED SERVICE POST (POSYANDU) PROGRAM IN TANJUNG VILLAGE, KOTO KAMPAR HULU DISTRICT

By:
Reva Lina
NIM. 12270521443

The Integrated Service Post (Posyandu) program is a community-based basic health service program developed by the government to improve public health. This study aims to determine the implementation of the Integrated Service Post (Posyandu) program in Tanjung Village, Koto Kampar Hulu District and what factors hinder the implementation of the Integrated Service Post (Posyandu) program in Tanjung Village, Koto Kampar Hulu District. This study uses a descriptive qualitative approach through in-depth interviews, observation, and documentation. This study uses the theory of policy implementation from George Edward III which includes four indicators: communication, resources, disposition, and bureaucratic structure. The results show that the implementation of the Posyandu Program in Tanjung Village has been running, but is not yet fully optimal. The disposition indicator shows quite good results, seen from the friendly attitude of cadres and health workers and supported by the provision of regular incentives. Meanwhile, indicators of communication, resources, and bureaucratic structure still need to be improved, especially related to the uneven delivery of information, limited quality of human resources and facilities, and the suboptimal implementation of SOPs and coordination between implementers. In addition, inhibiting factors in program implementation include limited budget, facilities and infrastructure, cadre competency, lack of socialization, irregular implementation schedule, and manual recording system.

Keywords: *Implementation, Public Policy, Integrated Health Posts*

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR



Segala puji hanya milik Allah SWT yang telah memberikan kemudahan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik. Tanpa pertolongan-Nya, penulis tentu tidak akan mampu menyelesaikan proposal ini dengan sempurna. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita, Nabi Muhammad SAW, yang kita harapkan syafa'atnya di hari akhir nanti.

Penulis mengungkapkan rasa syukur yang mendalam kepada Allah SWT atas segala nikmat kesehatan, baik jasmani maupun rohani, sehingga penulis diberi kemampuan untuk menyelesaikan pembuatan skripsi berjudul ***IMPLEMENTASI PROGRAM POS PELAYANAN TERPADU (POSYANDU) DI DESA TANJUNG KECAMATAN KOTO KAMPAR HULU.***

Merupakan suatu karya ilmiah yang ditulis sebagai salah satu persyaratan mendapatkan gelar Sarjana Sosial (S.Sos) di Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial pada jurusan Administrasi Negara Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan dan masih mengandung berbagai kekurangan dan kesalahan. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari para pembaca agar skripsi ini dapat diperbaiki dan dikembangkan menjadi lebih baik.

Pada kesempatan yang penuh berkah ini, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada kedua orang tua tercinta, Ayahanda Jaafar dan Ibunda Neti. Dua orang yang sangat berjasa dalam hidup penulis, dua orang yang selalu mengusahakan anak pertamanya ini menempuh pendidikan setinggi-tingginya meskipun mereka berdua sendiri hanya bisa menempuh pendidikan sampai tahap dasar. Kepada ayah, terima kasih atas setiap cururan keringat dan kerja keras yang engkau tukarkan menjadi sebuah nafkah demi anakmu bisa sampai kepada tahap ini, demi anakmu dapat mengenyam



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pendidikan sampai ke tingkat ini, dan terima kasih telah menjadi contoh untuk menjadi seorang yang bertanggung jawab penuh terhadap keluarga. Untuk ibu, terima kasih atas segala motivasi, pesan, doa, dan harapan yang selalu mendampingi setiap langkah dan ikhtiar anakmu untuk menjadi seseorang yang berpendidikan, terima kasih atas kasih sayang tanpa batas yang tak pernah lekang oleh waktu, atas kesabaran dan pengorbanan yang selalu mengiringi perjalanan hidup penulis, terima kasih telah menjadi sumber kekuatan dan inspirasi, serta pelita yang tak pernah padam dalam setiap langkah yang penulis tempuh. Terakhir, terima kasih atas segala hal yang kalian berikan yang tak terhitung jumlahnya.

Tidak lupa, penulis juga ingin mengucapkan terima kasih kepada adik kandung M. Ayub yang memberikan dukungan dan semangat dalam setiap langkah perjuangan penulis.

Pada kesempatan ini kerendahan hati dan penuh dengan rasa hormat penulis juga mengucapkan terima kasih kepada:

1. Ibu Prof. Hj. Lenny Nofianti MS, SE., M.Si, Ak, CA selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau beserta jajarannya.
2. Ibu Dr. Desril Miftah, S.E, M.M, Ak selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
3. Ibu Dr. Nurlasera S.E., M.Si selaku Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
4. Bapak Dr. Khairil Henry. S.E., M.Si., A.k selaku Wakil Dekan II Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
5. Ibu Dr. Mustiqowati Ummul F, S.Pd., M.Si selaku Wakil Dekan III Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
6. Bapak Khairunsyah Purba, S.Sos., M.Si selaku Ketua Program Studi S1 Administrasi Negara Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Kasim Riau
7. Bapak Rodi Wahyudi, S.Sos., M.Soc selaku Sekretaris Program Studi S1 Administrasi Negara Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

8. Bapak Dr. Kamaruddin, S.Sos, M.Si selaku dosen pembimbing skripsi yang telah banyak membimbing membantu mengarahkan serta memberikan saran kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini
9. Bapak Rusdi, S.Sos., M.A selaku dosen Pembimbing Akademik.
10. Bapak/ibu Dosen dan Staff Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial yang telah memberikan ilmu pengetahuan selama penulis mengikuti perkuliahan.
11. Bapak Nasrullah, S.Sos selaku Kepala Desa Tanjung, ibu Helni Ramzah selaku Bidan Desa, dan ketua Kader Posyandu Desa Tanjung ibu Helti, Ibu Fitra Dewita dan Ibu Alistrawati yang telah memberikan informasi kepada penulis.
12. Terimakasih kepada sahabat-sahabat seperjuangan di Desa Tanjung yang telah memberikan dukungan, semangat, serta kebersamaan selama proses penyusunan skripsi ini.
13. Terimakasih juga kepada Sahabat Lokal F 2022 yang selalu memberikan semangat kepada penulis.
14. Terakhir, kepada diri sendiri, Reva Lina. Apresiasi sebesar-besarnya untuk diri sendiri yang telah diam-diam berjuang tanpa henti. Terima kasih telah bekerja keras dan bertahan sejauh ini. Untuk setiap malam yang dihabiskan dalam kelelahan, setiap pagi yang disambut dengan kekhawatiran, namun tetap dijalani dan berhasil dilalui. Terima kasih kepada hati yang tetap ikhlas, meski banyak hal yang terjadi di luar prediksi. Teruslah belajar dan mensyukuri nikmat yang Tuhan berikan. Tetap semangat untuk terus berusaha, berbahagialah dimanapun berada. Penulis berdoa agar langkah kecilmu selalu diperkuat, dikelilingi orang-orang baik dan hebat, serta mimpimu satu persatu akan terjawab. Aamiin..

Pekanbaru, 09 Februari 2026

Reva Lina
NIM. 12270521443



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR GAMBAR	x
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	18
1.3 Tujuan Penelitian	18
1.4 Manfaat Penelitian	19
1.5 Sistematika Penulisan	20
BAB II LANDASAN TEORI	22
2.1 Kebijakan Publik	22
2.1.1 Tahap-Tahap Perumusan Kebijakan Publik	23
2.2 Implementasi Kebijakan Publik	24
2.2.1 Model Implementasi Kebijakan	26
2.3 Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu)	34
2.3.1 Tujuan Posyandu	35
2.3.2 Sasaran Posyandu	35
2.3.3 Pelaksanaan Layanan Posyandu	36
2.3.4 Pelaksana Posyandu	36
2.4 Penelitian Terdahulu	37
2.5 Pandangan Islam Terhadap Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu)	39
2.6 Defenisi Konsep	41
2.7 Konsep Operasional	42
2.8 Kerangka Pemikiran	43
BAB III METODE PENELITIAN	44
3.1 Jenis Penelitian	44

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3.2 Lokasi Dan Waktu Penelitian.....	44
3.3 Jenis Dan Sumber Data	45
3.4 Informan Penelitian	45
3.5 Teknik Pengumpulan Data	46
3.6 Teknik Analisis Data	47
BAB IV GAMBARAN UMUM TEMPAT PENELITIAN.....	48
4.1 Gambaran Singkat Desa Tanjung Kecamatan Koto Kampar Hulu.....	48
4.1.1 Keadaan Geografis Desa Tanjung.....	48
4.1.2 Keadaan Demografis Desa Tanjung.....	49
4.2 Gambaran Umum Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) di Desa Tanjung Kecamatan Koto Kampar Hulu.....	56
4.2.1 Visi Misi.....	58
4.2.2 Struktur Posyandu Dwi Karya 1,2 dan 3 Desa Tanjung Kecamatan Koto Kampar Hulu.....	59
4.2.3 Tugas Pokok dan Fungsi	60
BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN	64
5.1 Implementasi Program Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) Di Desa Tanjung Kecamatan Koto Kampar Hulu.....	64
5.1.1 Komunikasi	68
5.1.2 Sumber daya.....	78
5.1.3 Disposisi	94
5.1.4 Struktur birokrasi.....	99
5.2 Faktor penghambat implementasi program Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) di Desa Tanjung Kecamatan Koto Kampar Hulu	104
5.2.1 Kurangnya anggaran dalam pelaksanaan program posyandu	105
5.2.2 Keterbatasan sarana dan prasarana.....	108
5.2.3 Keterbatasan kompetensi dan pelatihan kader	110
5.2.4 Kurangnya sosialisasi dan penyampaian informasi yang belum merata kepada masyarakat	111
5.2.5 Jadwal pelaksanaan posyandu yang tidak menetap.....	113
5.2.6 Pencatatan dan pelaporan kegiatan posyandu yang masih	

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bersifat manual.....	114
BAB VI PENUTUP	117
6.1 Kesimpulan.....	117
6.2 Saran.....	119
DAFTAR PUSTAKA	122
LAMPIRAN.....	126



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Kelompok Sasaran dan Kegiatan Pelayanan Posyandu Menurut Kementerian Kesehatan RI, 2023	4
Tabel 1.2	Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin (ribu jiwa) di Kabupaten Kampar, 2024	7
Tabel 1.3	Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin (ribu jiwa) Kecamatan Koto Kampar Hulu.....	8
Tabel 1.4	Kelompok Sasaran dan Kegiatan Pelayanan di Desa Tanjung Kecamatan Koto Kampar Hulu.....	9
Tabel 1.5	Data Jumlah dan Partisipasi Lansia dalam Kegiatan Posyandu Desa Tanjung Kecamatan Koto Kampar Hulu Tahun 2022-2024.....	13
Tabel 1.6	Sarana dan Prasarana Kegiatan Posyandu Desa Tanjung Kecamatan Koto Kampar Hulu	14
Tabel 2.1	Penelitian Terdahulu	37
Tabel 2.2	Indikator Penelitian	42
Tabel 3.1	Informan Penelitian.....	46
Tabel 4.1	Pembagian Penduduk Desa Tanjung Berdasarkan Jenis Kelamin.....	50
Tabel 4.2	Pembagian Penduduk Desa Tanjung Berdasarkan Agama Yang Dianut.....	51
Tabel 4.3	Jumlah Sarana Rumah Ibadah.....	52
Tabel 4.4	Sarana Objek Wisata.....	52
Tabel 4.5	Jumlah Sarana Pendidikan	53
Tabel 4.6	Keadaan Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan	54
Tabel 4.7	Daftar Nama Pemerintahan Desa.....	55
Tabel 4.8	Daftar Nama Kepala Dusun Desa Tanjung.....	56
Tabel 5.1	Jumlah Petugas Posyandu Di Desa Tanjung Kecamatan Koto.....	80

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Kerangka Pemikiran	43
Gambar 4.1	Struktur Posyandu Dwi Karya 1 Desa Tanjung Kecamatan Koto Kampar Hulu.....	59
Gambar 4.2	Struktur Posyandu Dwi Karya 2 Desa Tanjung Kecamatan Koto Kampar Hulu.....	59
Gambar 4.3	Struktur Posyandu Dwi Karya 3 Desa Tanjung Kecamatan Koto Kampar Hulu.....	60
Gambar 5.1	Kondisi Fasilitas dan Tempat Pelaksanaan Kegiatan Posyandu.....	92

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan nasional pada hakikatnya bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup seluruh masyarakat. Salah satu indikator utama keberhasilan pembangunan tersebut adalah tercapainya derajat kesehatan masyarakat yang optimal. Kesehatan tidak hanya dipandang sebagai kebutuhan dasar, tetapi juga sebagai investasi strategis dalam pembangunan sumber daya manusia. Masyarakat yang sehat akan memiliki produktivitas yang lebih tinggi serta mampu berperan aktif dalam berbagai sektor pembangunan (Lorita et al. 2023).

Pembangunan kesehatan bertujuan untuk meningkatkan keadaan kesehatan masyarakat sesuai dengan visi Indonesia Sehat 2025, melalui terciptanya lingkungan hidup yang sehat, perilaku hidup yang sehat, dan akses yang merata terhadap pelayanan kesehatan berkualitas bagi masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan kesehatan.

Inisiatif dan penyediaan fasilitas di seluruh Indonesia mencakup pembangunan rumah sakit pusat, rumah sakit kabupaten, rumah sakit di tingkat kabupaten/kota, puskesmas di tingkat kecamatan, serta dukungan dari puskesmas dan puskesmas di desa tertentu, dan pertumbuhan posyandu di setiap desa atau kelurahan (Mukarramah, 2020).

Berdasarkan Pasal 34 ayat (3) UUD 1945, kesehatan diakui sebagai hak asasi manusia yang mendasar, yang harus dijamin dan dilindungi oleh

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

negara. Salah satu metode penyampaian layanan kesehatan adalah melalui program pos pelayanan terpadu (Posyandu), yang didukung oleh tenaga kesehatan dari puskesmas dan masyarakat setempat (kader) (Izazi et al. 2022).

Posyandu merupakan gerakan masyarakat untuk mendapatkan layanan kesehatan dasar, bertujuan mempercepat pengurangan angka kematian ibu dan anak, meningkatkan status gizi masyarakat, dan mendorong program kesehatan untuk ibu dan anak di Indonesia. Kasus pendek (stunting) dan jurus (wasting) banyak ditemukan pada anak-anak kecil, sementara gangguan kekurangan energi kronis (KEK) sering dialami oleh ibu hamil (Ulfah dan Nugroho, 2020). Misi utama posyandu adalah berkontribusi pada penurunan Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB) di Indonesia melalui pemberdayaan masyarakat. Target dari posyandu adalah seluruh masyarakat, terutama bayi, anak balita, ibu hamil, ibu nifas, serta pasangan usia subur (Indah Sari & Indrawati, 2021). Pengembangan Posyandu juga dikenal sebagai penelitian mandiri Posyandu. Proses pengembangan Posyandu secara garis besar terbagi menjadi empat tahap: Posyandu Pratama, Posyandu Tengah, Posyandu Bulan Purnama, dan Posyandu Mandiri.

Posyandu Mandiri adalah jenis Posyandu yang menjalankan kegiatan rutin yang mencakup lima program pokok, yaitu Kesehatan Ibu dan Anak (KIA), Keluarga Berencana, Imunisasi, Gizi, dan Pencegahan Diare. Terdapat juga program tambahan dan dukungan dana medis yang mencakup lebih dari 50 persen keluarga. Karena itu, Posyandu Mandiri dianggap sebagai

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Posyandu dengan kualitas dan tingkat perkembangan yang tertinggi (Rahmanindar et al, 2019).

Posyandu merupakan salah satu bentuk Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) yang dikelola dan diselenggarakan dari, oleh, untuk dan bersama masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan kesehatan, guna memberdayakan masyarakat dan memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam memperoleh pelayanan kesehatan dasar untuk mempercepat penurunan angka kematian ibu dan bayi (Kemenkes RI, 2023).

Secara lembaga posyandu menurut Permendagri Nomor 13 Tahun 2024 tentang Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) Pasal 1 ayat (1): “Pos Pelayanan Terpadu yang selanjutnya disebut Posyandu adalah bagian dari lembaga kemasyarakatan desa/lembaga kemasyarakatan kelurahan sebagai wadah partisipasi masyarakat yang merupakan mitra pemerintah desa/kelurahan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan serta meningkatkan pelayanan desa/kelurahan.” Dalam Pasal 1 ayat (2) dan (3): dijelaskan bahwa “LKD (Lembaga Kemasyarakatan Desa) dan LKK (Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan) adalah wadah partisipasi masyarakat, mitra pemerintah desa/kelurahan yang turut merencanakan, melaksanakan pembangunan dan pelayanan masyarakat desa/kelurahan.” Selanjutnya, Permendagri Nomor 18 Tahun 2018 pasal 6 ayat (1) menyatakan bahwa Pos Pelayanan Terpadu termasuk dalam kategori LKD.

Perkembangan Posyandu di Indonesia menunjukkan tren peningkatan yang cukup signifikan dari waktu ke waktu. Berdasarkan data Kementerian

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam Negeri 2023, jumlah Posyandu di Indonesia mengalami pertumbuhan pesat sejak awal pengembangannya. Pada tahun 1992 tercatat sekitar 25.000 unit Posyandu, kemudian meningkat menjadi 269.202 unit pada tahun 2002, dan mencapai 276.392 unit pada tahun 2012. Namun, pada tahun 2022 jumlah Posyandu tercatat menurun menjadi 213.670 unit, yang salah satunya dipengaruhi oleh dampak pandemi COVID-19 terhadap sistem pelayanan kesehatan masyarakat (Lorita et al. 2023).

Program posyandu ada 2 yaitu program pelayanan kesehatan dasar dan program layanan sosial dasar. Program pelayanan kesehatan menurut KMK RI No.HK.01.07/MENKES/2015/2023, kegiatan pelayanan posyandu dilaksanakan dengan mempertimbangkan kelompok sasaran di masyarakat. Masing-masing kelompok sasaran memerlukan jenis layanan yang berbeda sesuai dengan kebutuhan kesehatan dan tahapan kehidupannya. Adapun kelompok sasaran dan jenis kegiatan pelayanan tersebut dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 1.1
Kelompok Sasaran dan Kegiatan Pelayanan Posyandu Menurut Keputusan Menteri Kesehatan RI, No HK.01.07/Menkes/2015/2023

No	Kelompok Sasaran	Kegiatan Pelayanan
1	Ibu Hamil/ Ibu Nifas/ Ibu Menyusui /Bayi/ Balita/ Apras/ usia sekolah/ Remaja/ Usia Dewasa/ Lansia	1. Pemeriksaan status gizi melalui penimbangan berat badan dan pengukuran tinggi badan 2. Skrining gejala TBC 3. Penyuluhan dan konseling 4. Pemberian makan tambahan (PMT)
2	Ibu Hamil/ Ibu Nifas/ Ibu Menyusui	Lingkar Lengan Atas
3	Bayi/ Balita/ Apras	1. Lingkar Lengan Atas 2. Lingkar Kepala 3. Checklist perkembangan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

No	Kelompok Sasaran	Kegiatan Pelayanan
4	Usia sekolah/ Remaja	<ol style="list-style-type: none"> 1. Skrining anemia pada remaja putri kelas 7 dan 10. 2. Skrining anemia dilakukan saat penjarangan kesehatan pada pemeriksaan status gizi melalui: <ol style="list-style-type: none"> 1. Anamnesis singkat: keluhan 5L, riwayat talasemia di keluarga 2. Tanda klinis: konjungtiva pucat, telapak tangan pucat 3. Pemeriksaan hemoglobin 3. Skrining masalah kesehatan (HEEADSss) <ol style="list-style-type: none"> a. Home (Rumah) b. Education (Pendidikan) c. Eating (Pola makan) d. Activity (Aktivitas) e. Drugs (Obat-obatan) f. Sexuality (Aktivitas seksual) g. Safety (Keselamatan) h. Suicide/ Depresi (Bunuh diri/ depresi)
5	Usia Dewasa dan Lansia	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengukuran lingkar Perut 2. Pengukuran tekanan darah serta perhitungan denyut nadi 3. Pemeriksaan kadar gula darah, kolesterol dan asam urat. 4. Skrining PPOK (PUMA) 5. Skrining Gejala TBC 6. Kegiatan olahraga 7. Skrining gangguan Indera (penglihatan dan pendengaran) 8. Pemeriksaan kesehatan jiwa (SRQ 20) 9. Pelayanan Kontrasepsi 10. Skrining aktifitas kehidupan sehari-hari (AKS) 11. Skrining Lansia Sederhana (SKILAS)

Sumber: KMK RI No.HK.01.07/MENKES/2015/2023

Selain program pelayanan kesehatan dasar terdapat juga program layanan sosial dasar dalam Permendagri Nomor 19 Tahun 2011, yaitu:

1. Bina Keluarga Balita (BKB), meliputi:
 - a. Penyuluhan kepada keluarga/orang tua tentang kesehatan, gizi, perawatan, pengasuhan;
 - b. Stimulasi aspek-aspek perkembangan anak menggunakan alat permainan edukatif; dan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Rujukan bila anak mengalami gangguan tumbuh kembang.
2. Pos PAUD, meliputi stimulasi pendidikan.
3. Percepatan penganekaragaman konsumsi pangan, meliputi sosialisasi konsumsi pangan beragam, bergizi berimbang dan aman berbasis sumber daya lokal, penempelan poster, leaflet serta pemutaran VCD.
4. Pemberdayaan fakir miskin, komunitas adat terpencil dan penyandang masalah kesejahteraan sosial, meliputi konsultasi, informasi, advokasi dan rujukan.
5. Peningkatan ekonomi keluarga, meliputi simpan pinjam yang khusus dilakukan oleh kelompok perempuan, koperasi, pelatihan dan keterampilan peningkatan ekonomi keluarga.

Berdasarkan Peraturan Bupati Kampar Nomor 3 Tahun 2024 tentang Percepatan Penurunan Stunting Pasal 1 ayat (10): "Posyandu adalah lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan yang mewadahi pemberdayaan masyarakat dalam pelayanan sosial dasar dan pelaksanaannya dapat disinergikan dengan pelayanan lainnya sesuai potensi daerah."

Di wilayah Kabupaten Kampar, tingginya angka harapan hidup menjadi salah satu indikator penting yang mencerminkan kesejahteraan masyarakatnya. Pertumbuhan populasi masyarakat di Kabupaten Kampar ini menandakan kemajuan yang positif, seperti yang dapat dilihat pada tabel berikut.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel 1.2
Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin (ribu jiwa) di Kabupaten Kampar, 2024

Kelompok Umur	Penduduk (Laki-Laki) (Ribu)	Penduduk (Perempuan) (Ribu)	Penduduk (Laki-Laki + Perempuan) (Ribu)
0-4	35.9	33.1	68.9
5-9	46.1	42.8	88.9
10-14	46.9	43.9	90.8
15-19	36.6	34.6	71.3
20-24	41	39.4	80.4
25-29	38.1	36.4	74.5
30-34	35.6	35.1	70.6
35-39	34.7	35.3	70.1
40-44	35.1	34.6	69.7
45-49	30.7	29	59.7
50-54	25.6	24.3	49.9
55-59	20	18.9	38.9
60-64	14.2	13.9	28.1
65-69	9.2	8.5	17.7
70-74	5.2	5	10.1
75+	4.3	5.1	9.4
Jumlah/Total	459.2	439.8	899

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Kampar 2024

Berdasarkan data tersebut, jumlah penduduk di kelompok usia produktif dan anak-anak cukup besar. Kondisi ini menunjukkan pentingnya keberadaan Posyandu sebagai pusat pelayanan kesehatan yang dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat, khususnya dalam pencegahan penyakit dan peningkatan gizi anak serta kesehatan ibu.

Kecamatan Koto Kampar Hulu merupakan salah satu wilayah di Kabupaten Kampar yang memiliki jumlah penduduk cukup besar dan tersebar

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

di beberapa desa. Sebagai wilayah yang terus berkembang, Kecamatan Koto Kampar Hulu memiliki karakteristik penduduk yang beragam, baik dari segi usia maupun jenis kelamin. Untuk memperoleh gambaran yang lebih spesifik mengenai wilayah penelitian, berikut disajikan data jumlah penduduk menurut kelompok umur dan jenis kelamin di Kecamatan Koto Kampar Hulu.

Tabel 1.3
Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Kecamatan Koto Kampar Hulu, 2024

Kelompok Umur	Jenis Kelamin		Jumlah
	Laki-Laki	Perempuan	
0-4	803	718	1.521
5-9	1.026	987	2.013
10-14	1.080	970	2.050
15-19	659	710	1.369
20-24	1.017	957	1.974
25-29	914	823	1.737
30-34	811	784	1.595
35-39	827	885	1.712
40-44	944	861	1.805
45-49	739	651	1.390
50-54	549	532	1.081
55-59	395	387	782
60-64	293	299	592
65-69	216	180	396
70-74	104	131	235
75+	134	150	284
Koto Kampar Hulu	10.511	10.025	20.536

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Kampar 2024

Berdasarkan Tabel 1.3, jumlah penduduk Kecamatan Koto Kampar Hulu pada tahun 2024 tercatat sebanyak 20.536 jiwa, yang terdiri dari 10.511

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penduduk laki-laki dan 10.025 penduduk perempuan, dengan komposisi penduduk yang relatif seimbang. Ditinjau dari kelompok umur, penduduk usia anak dan usia produktif merupakan kelompok yang mendominasi jumlah penduduk. Kondisi tersebut menunjukkan besarnya sasaran pelayanan kesehatan, khususnya pelayanan kesehatan ibu dan anak. Keberagaman komposisi penduduk ini mengindikasikan bahwa Kecamatan Koto Kampar Hulu memiliki kebutuhan pelayanan kesehatan masyarakat yang beragam, sehingga keberadaan Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) menjadi penting sebagai sarana pelayanan kesehatan dasar yang mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat.

Pelaksanaan kegiatan Posyandu di Desa Tanjung mencakup berbagai kelompok sasaran, mulai dari ibu hamil, bayi, balita, remaja, usia produktif hingga lanjut usia. Setiap kelompok memperoleh layanan kesehatan yang berbeda sesuai kebutuhan masing-masing. Program ini dilaksanakan oleh kader dan tenaga kesehatan desa secara rutin sebagai bentuk pelayanan dasar kepada masyarakat. Berikut adalah kelompok sasaran dan jenis kegiatan pelayanan Posyandu di Desa Tanjung Kecamatan Koto Kampar Hulu dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 1.4
Kelompok Sasaran dan Kegiatan Pelayanan Posyandu di Desa Tanjung Kecamatan Koto Kampar Hulu

No	Kelompok Sasaran	Kegiatan Pelayanan
1	Ibu Hamil/ Ibu Nifas/ Ibu Menyusui	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penimbangan berat badan, pengukuran tinggi badan, pengukuran lingkaran lengan atas dan pengukuran tekanan darah. 2. Penyuluhan dan konseling. 3. Pemberian makan tambahan (PMT). 4. Pemberian vitamin.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2	Bayi/ Balita/ Apras	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penimbangan berat badan, pengukuran tinggi badan. 2. Penimbangan bulanan dan penyuluhan. 3. Pemberian paket pertolongan gizi (vitamin A,MP-ASI, dan PMT). 4. Imunisasi lengkap dan pemantauan kasus lumpuh layuh. 5. Mengenali penyakit, pengobatan sederhana dan rujukan (diare, pneumonia).
3	Usia sekolah/ Remaja	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penimbangan berat badan dan pengukuran tinggi badan . 2. Pemberian tablet tambah darah. 3. Pemberian susu/ vitamin. 4. Pemeriksaan gula darah dan tekanan darah. 5. Aktivitas fisik. 6. Penyuluhan rokok, NAPZA dan konseling.
4	Usia Dewasa/ produktif	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penimbangan berat badan, pengukuran tinggi badan dan pengukuran lingkaran perut. 2. Pengukuran tekanan darah, gula darah, kolestrol dan asam urat. 3. Pemberian obat untuk yang ada riwayat hipertensi, gula, kolestrol dan asam urat. 4. Kegiatan olahraga.
5	Lansia	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penimbangan berat badan, pengukuran tinggi badan dan pengukuran lingkaran perut. 2. Pengukuran tekanan darah, gula darah, kolestrol dan asam urat. 3. Pemberian obat untuk yang ada riwayat hipertensi, gula, kolestrol dan asam urat. 4. Kegiatan olahraga.

Sumber: Kader Posyandu Yang Di Olah Peneliti 2025

Berdasarkan Tabel 1.4, pelayanan Posyandu di Desa Tanjung Kecamatan Koto Kampar Hulu mencakup berbagai kelompok sasaran, mulai dari ibu hamil, bayi dan balita, usia sekolah dan remaja, usia dewasa produktif, hingga lanjut usia. Setiap kelompok sasaran memperoleh pelayanan kesehatan yang disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing, baik dalam bentuk pemantauan kesehatan, pencegahan penyakit, maupun kegiatan promotif dan preventif. Hal ini menunjukkan bahwa Posyandu di Desa Tanjung berperan sebagai sarana pelayanan kesehatan dasar yang

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bersifat terpadu dalam menjangkau berbagai lapisan masyarakat.

Fokus utama Posyandu adalah memberikan pelayanan kesehatan yang menekankan pada tindakan pencegahan. Posyandu menjadi bagian yang sangat penting dalam menjaga kesehatan serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Idealnya, program ini diharapkan dapat menciptakan lingkungan yang mendukung partisipasi secara aktif, memberikan akses terhadap layanan kesehatan yang memadai, serta mendorong peningkatan kesadaran akan pentingnya kesehatan di kalangan lansia (Iswarawanti, 2010).

Penyelenggaraan Posyandu melibatkan pelaksanaan kegiatan yakni para masyarakat yang sudah memperoleh pelatihan sebagai tenaga sukarelawan kesehatan berdasarkan panduan dari pusat pelayanan kesehatan masyarakat. Para pengelola program ini terdiri dari kader kader PKK, tokoh masyarakat formal atau non formal (Afrizal, 2022).

Idealnya Informasi kegiatan posyandu ini disebarakan secara terbuka dan rutin melalui berbagai media (papan pengumuman, spanduk, grup WhatsApp, atau surat pemberitahuan), Jadwal kegiatan ditetapkan secara tetap dan diumumkan kepada masyarakat (Ilyas, 2017).

Secara ideal, pelaksanaan Posyandu seharusnya didukung oleh dana operasional yang memadai, terencana, dan berkelanjutan agar seluruh kegiatan posyandu dapat berjalan optimal sesuai pedoman Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Tahun 2023. Dengan dukungan dana yang mencukupi, kegiatan posyandu tidak hanya difokuskan pada pelayanan medis dasar, tetapi juga dapat mencakup kegiatan Pemberian Makan Tambahan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

(PMT), kegiatan olahraga, dan kegiatan non kesehatan (Ardiani e al. 2025).

Posyandu di Desa Tanjung sudah berjalan sejak tahun 2000, tetapi hanya untuk posyandu ibu hamil, balita dan usia remaja. Pada tahun 2016 posyandu di Desa Tanjung sudah diperuntukkan juga untuk usia produktif dan lansia. Posyandu di Desa Tanjung terbagi menjadi tiga posyandu, yaitu Posyandu Dwi karya 1 yang berlokasi di Poskesdes, Posyandu Dwi karya 2 berlokasi di PAUD Permata Ibu, dan Posyandu Dwi karya 3 yang berlokasi di rumah salah satu kader posyandu. Pelaksanaan kegiatan posyandu ini fleksibel, terkadang dilaksanakan di posko masing-masing posyandu, namun ada kalanya juga digelar di Poskesdes sebagai pusat pelayanan kesehatan desa.

Realita yang terjadi pada program Posyandu di Desa Tanjung Kecamatan Koto Kampar hulu masih belum maksimal dari gambaran ideal tersebut. Program posyandu masih menghadapi beberapa kendala yang menghambat terciptanya layanan kesehatan preventif yang optimal.

Berdasarkan hasil observasi awal dan wawancara dengan kader Posyandu di Desa Tanjung, salah satu permasalahan dalam pelaksanaan Posyandu adalah masih rendahnya partisipasi masyarakat dalam mengikuti kegiatan Posyandu. Hal ini terlihat dari belum meratanya kehadiran masyarakat pada setiap pelaksanaan kegiatan, khususnya pada kelompok usia dewasa dan lansia. Rendahnya partisipasi tersebut menunjukkan bahwa belum seluruh kelompok sasaran terlibat secara aktif dalam kegiatan Posyandu.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kondisi ini berdampak pada belum optimalnya pelaksanaan program Posyandu sebagai upaya pelayanan kesehatan berbasis masyarakat.

Untuk melihat sejauh mana tingkat partisipasi masyarakat dalam kegiatan Posyandu di Desa Tanjung Kecamatan Koto Kampar Hulu, berikut disajikan data partisipasinya selama tiga tahun terakhir:

Tabel 1.5
Data Jumlah dan Partisipasi Masyarakat dalam Kegiatan Posyandu Desa Tanjung Kecamatan Koto Kampar Hulu Tahun 2022- 2024

No	Kelompok Sasaran	Jumlah Terdaftar (Orang)			Persentase Partisipasi (%)		
		2022	2023	2024	2022	2023	2024
1	Ibu Hamil, Ibu Nifas dan Ibu Menyusui	71	74	78	98,6	98,7	97
2	Bayi dan Balita	220	280	320	90	91,07	93,08
3	Usia Sekolah / Remaja	221	240	300	81,4	79,1	83,3
4	Usia Dewasa / Produktif	707	710	716	17,7	20,4	22,3
5	Lansia	237	240	238	14,2	15,6	17,3
Total		1.456	1.544	1.652	301,9	304,87	313,7

Sumber: Kader Posyandu Yang Di Olah Peneliti 2025

Tabel tersebut menunjukkan data jumlah dan persentase partisipasi masyarakat dalam berbagai kelompok sasaran kegiatan Posyandu di Desa Tanjung Kecamatan Koto Kampar Hulu tahun 2022-2024 masih kurang optimal. Dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa usia dewasa / produktif dan lansia partisipasinya masih tergolong rendah. Sebagian besar masyarakat belum mengetahui jadwal pelaksanaan posyandu, dan informasi yang disampaikan masih terbatas melalui komunikasi lisan dari kader. Kondisi ini menggambarkan bahwa aspek komunikasi dalam implementasi program Posyandu di Desa Tanjung masih menjadi hambatan utama.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Permasalahan selanjutnya dalam pelaksanaan Posyandu di Desa Tanjung adalah dari aspek sarana dan prasarana, fasilitas pendukung Posyandu di Desa Tanjung masih terbatas dan belum merata pada setiap lokasi posyandu. Berikut disajikan sarana dan prasarana posyandu di Desa Tanjung, guna mengetahui tingkat ketersediaan fasilitas yang menunjang pelaksanaan pelayanan Posyandu.

Tabel 1.6
Sarana dan Prasarana Kegiatan Posyandu Desa Tanjung Kecamatan Koto Kampar Hulu

No	Sarana & Prasarana	Keterangan		
		Posyandu Dwi Karya 1	Posyandu Dwi Karya 2	Posyandu Dwi Karya 3
1	Gedung / Ruang Khusus Posyandu	Tersedia	Tidak Tersedia	Tidak Tersedia
2	Alat Kesehatan	Terbatas	Terbatas	Terbatas
3	Media Promosi (Banner, Poster, Leaflet)	Tidak Tersedia	Tidak Tersedia	Tidak Tersedia
4	Laptop/Komputer	Tidak Tersedia	Tidak Tersedia	Tidak Tersedia
5	Papan Nama Posyandu	Tidak Tersedia	Tidak Tersedia	Tidak Tersedia
6	Meja Kursi	Terbatas	Terbatas	Tidak Tersedia
7	Lemari Arsip	Tersedia	Tidak Tersedia	Tidak Tersedia
8	Tandu/ Kasur Periksa	Tersedia	Tidak Tersedia	Tidak Tersedia

Sumber : *Observasi Lapangan Posyandu Desa Tanjung 2025*

Berdasarkan tabel tersebut, diketahui bahwa ketersediaan sarana dan prasarana Posyandu di Desa Tanjung masih terbatas dan belum merata. Posyandu Dwi Karya 1 memiliki fasilitas yang relatif lebih lengkap dibandingkan dua Posyandu lainnya, sementara alat kesehatan pada seluruh Posyandu masih terbatas dan beberapa fasilitas penting, seperti media promosi, perangkat administrasi, dan papan nama belum tersedia. Kondisi ini berpotensi menghambat efektivitas pelaksanaan pelayanan Posyandu.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hal ini dikuatkan oleh Ibu Helti selaku ketua kader posyandu Dwi Karya 3 Desa Tanjung, beliau mengatakan:

“Fasilitasnya masih kurang, terutama tempat pelaksanaan yang terbatas, meja dan kursi belum mencukupi. Kami juga belum memiliki komputer untuk pencatatan, dan beberapa alat kesehatan masih belum lengkap.” (Wawancara tanggal 16 Oktober 2025)

Berdasarkan hasil wawancara pra-penelitian dengan kader Posyandu Desa Tanjung pada tanggal 15 Mei 2025, diketahui bahwa salah satu permasalahan dalam implementasi program Posyandu adalah terhentinya sebagian program posyandu yang sebelumnya pernah dilaksanakan.

Salah satu permasalahan tersebut adalah Pemberian Makanan Tambahan (PMT) untuk kelompok usia remaja, dewasa, dan lanjut usia di Posyandu Desa Tanjung sebelumnya pernah berjalan, tetapi dihentikan pada tahun 2022 karena keterbatasan dana operasional, sehingga prioritas anggaran hanya difokuskan pada kelompok yang dinilai paling membutuhkan, seperti balita dan ibu hamil. Kondisi ini membuat usia sekolah/ remaja, usia dewasa/ produktif dan lanjut usia tidak lagi mendapatkan tambahan asupan gizi dari program PMT, padahal kegiatan tersebut sangat penting untuk mendukung kesehatan, pencegahan penyakit kronis, dan memenuhi kebutuhan gizi kelompok usia lanjut maupun dewasa produktif.

Hal ini dikuatkan oleh Ibu Helti selaku ketua kader posyandu Dwi Karya 3 Desa Tanjung, beliau mengatakan:

“PMT untuk remaja, dewasa dan lansia sudah dihentikan karena dananya tidak mencukupi, sekarang diprioritaskan untuk balita dan ibu hamil.” (Wawancara tanggal 15 Mei 2025)

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dan untuk kegiatan pemberdayaan/ kegiatan non kesehatan Posyandu di Desa Tanjung pernah melaksanakan program lansia kreatif atau kegiatan keterampilan seperti menganyam bagi para lansia. Kegiatan tersebut tidak hanya berfungsi sebagai ajang pertemuan sosial dan rekreasi, tetapi juga memiliki nilai ekonomi karena hasil anyaman dapat dijual kembali. Sayangnya, kegiatan tersebut hanya berlangsung sejak tahun 2016-2022. Akibat keterbatasan dana tersebut, kegiatan Posyandu Lansia kini hanya berfokus pada pelayanan dasar seperti pemeriksaan tekanan darah, penimbangan berat badan, dan pembagian vitamin, tanpa disertai kegiatan pemberdayaan atau peningkatan kesejahteraan lansia. Padahal, kegiatan seperti menganyam atau pelatihan keterampilan rumah tangga berpotensi menjadi alternatif kegiatan produktif bagi lansia.

Dengan adanya kegiatan semacam itu, para lansia sebenarnya dapat tetap aktif, mandiri, dan memperoleh penghasilan tambahan dari rumah, tanpa perlu melakukan pekerjaan berat. Kegiatan tersebut juga berperan penting dalam menjaga kesehatan mental dan sosial lansia, karena memberikan rasa dihargai dan kesempatan untuk tetap berkontribusi dalam masyarakat.

Hal ini dikuatkan oleh Ibu Alistrawati selaku ketua kader posyandu Dwi Karya 1 Desa Tanjung, beliau mengatakan:

“Dana operasional Posyandu Lansia sangat terbatas, sehingga kegiatan yang dilakukan sekarang hanya kegiatan dasar saja.”
(wawancara tanggal 15 Mei 2025)

Permasalahan selanjutnya dalam pelaksanaan posyandu adalah pencatatan dan pelaporan kegiatan posyandu masih dilakukan secara manual.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Padahal menurut KMK RI No.HK.01.07/MENKES/2015/2023, sistem pelaporan kesehatan harus dilakukan secara terintegrasi dan berbasis digital melalui aplikasi Sistem Informasi Posyandu (SIP). Penyebab utama pencatatan manual adalah keterbatasan sumber daya manusia yang belum terlatih menggunakan sistem digital, serta belum tersedianya perangkat dan infrastruktur pendukung seperti komputer atau aplikasi pencatatan.

Akibat dari pencatatan manual ini, sering terjadi kesalahan dalam penulisan data, kehilangan arsip, serta proses rekapitulasi yang memakan waktu lama. Hal ini berdampak pada lambatnya proses pelaporan ke pihak puskesmas atau dinas kesehatan, serta menyulitkan dalam melakukan pemantauan dan evaluasi perkembangan kesehatan lansia secara akurat dan cepat. Jika praktik ini terus berlangsung, maka risiko ketidaksesuaian data, sulitnya pengambilan keputusan berbasis data, dan tidak tercapainya standar pelayanan minimal akan semakin besar

Hal ini dikuatkan oleh Ibu Fitra Dewita selaku ketua kader posyandu Dwi Karya 2 Desa Tanjung, beliau mengatakan:

“Pencatatan masih manual karena belum ada komputer dan kami juga belum terbiasa menggunakan komputer itu.” (wawancara tanggal 15 Mei 2025)

Apabila disederhanakan berdasarkan pemaparan latar belakang yang telah diuraikan serta gejala-gejala yang penulis temukan di lapangan, maka terdapat 4 (empat) fenomena yang terjadi dalam pelaksanaan Posyandu di Desa Tanjung Kecamatan Koto Kampar Hulu, yakni: 1) Rendahnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan posyandu. 2) Fasilitas pendukung

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Posyandu di Desa Tanjung masih terbatas dan belum merata pada setiap lokasi posyandu. 3) Terhentinya sebagian program posyandu yang sebelumnya pernah dilaksanakan. 4) Pencatatan dan pelaporan kegiatan posyandu masih dilakukan secara manual. Padahal menurut KMK RI No.HK.01.07/MENKES/2015/2023, sistem pelaporan kesehatan harus dilakukan secara terintegrasi dan berbasis digital

Berdasarkan pemaparan diatas peneliti tertarik mengkaji lebih dalam tentang masalah yang dipaparkan sebelumnya. Maka peneliti mengambil judul “**Implementasi Program Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) Di Desa Tanjung Kecamatan Koto Kampar Hulu**”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah disampaikan, maka permasalahan yang ingin dikaji adalah:

1. Bagaimana implementasi program Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) di Desa Tanjung Kecamatan Koto Kampar Hulu ?
2. Apa saja faktor penghambat implementasi program Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) di Desa Tanjung Kecamatan Koto Kampar Hulu?

1.3 Tujuan Penelitian

Dengan merujuk pada rumusan masalah tersebut, penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk mengetahui implementasi program Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) di Desa Tanjung Kecamatan Koto Kampar Hulu.
2. Untuk mengetahui apa saja faktor penghambat implementasi program

Pelayanan Terpadu (Posyandu) di Desa Tanjung Kecamatan Koto Kampar Hulu.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan manfaat, yaitu sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis

a. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman dan mendorong masyarakat agar lebih aktif berpartisipasi dan memanfaatkan Posyandu Lansia.

b. Bagi Posyandu Dwi Karya

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan masukan yang bermanfaat untuk menyempurnakan pelaksanaan Program Posyandu Lansia atau sekurang-kurangnya dapat dijadikan referensi untuk mengevaluasi pelaksanaan Posyandu Lansia di Desa Tanjung Kecamatan Koto Kampar Hulu.

c. Bagi mahasiswa

Penelitian ini berfungsi sebagai media pembelajaran dalam rangka pengembangan wawasan akademik, berupa hasil analisis data yang dapat digunakan untuk kepentingan penelitian-penelitian selanjutnya, serta memenuhi syarat akademik untuk memperoleh gelar Sarjana Sosial (S.Sos) di Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Manfaat praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan dan kontribusi pemikiran bagi stakeholder terkait dalam hal penerapan kebijakan publik, dengan tujuan terciptanya kebijakan yang efektif dalam mengatasi problematika masyarakat serta sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat.

1.5 Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah pemahaman pembaca terhadap isi proposal ini, sistematika penulisan disusun dalam tiga bab utama sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini memuat uraian mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini membahas berbagai teori yang menjadi dasar konseptual dalam penelitian, termasuk teori kebijakan publik, implementasi kebijakan, pelaksanaan, serta teori yang berkaitan dengan program Posyandu.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini menjelaskan secara rinci metode penelitian yang digunakan, meliputi lokasi dan waktu penelitian, jenis penelitian, jenis dan sumber data, informan penelitian, teknik pengumpulan data, serta teknik analisis data.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

Bab ini berisi tentang gambaran umum mengenai objek yang akan diteliti dan tempat dimana dilakukan penelitian, seperti lokasi penelitian, visi misi organisasi, struktur organisasi serta tugas pokok fungsi organisasi tersebut.

BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menjelaskan dan memaparkan uraian tentang hasil penelitian

BAB VI PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan yang diperoleh dari hasil penelitian dan saran yang diberikan kepada hasil penelitian

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II LANDASAN TEORI

2.1 Kebijakan Publik

Secara etimologi Kebijakan berasal dari bahasa Yunani yaitu “Polis” artinya “negara-kota”. Istilah kebijakan sering dipakai sebagai tindakan pemerintah, perilaku negara, atau aktivitas. Sebuah kebijakan bukanlah sebuah kejadian tunggal dan terisolasi, melainkan sebuah praktik sosial. Hal ini menunjukkan bahwa segala sesuatu yang diciptakan oleh pemerintah merupakan produk dari seluruh peristiwa sosial dan melayani kepentingan masyarakat secara keseluruhan. Setelah suatu insiden, kebijakan dikembangkan untuk menyatukan pihak-pihak yang berseberangan dan memberikan perhatian yang wajar (Thoah, 2005).

Menurut Harold Lasswell dan Abraham Kaplan mengungkapkan (dalam Thoah, 2005) bahwa “kebijakan adalah sebuah program yang dirancang berdasarkan tujuan, nilai-nilai, dan praktik-praktik tertentu”. Dengan kata lain, kebijakan merupakan hasil proyeksi dari apa yang ingin dicapai, prinsip-prinsip yang dipegang, serta cara-cara yang diterapkan untuk mewujudkannya.

Sementara itu menurut Thomas R Dye (dalam Thoah, 2005) menjelaskan bahwa “kebijakan publik sebagai segala sesuatu yang diputuskan oleh pemerintah untuk dilakukan atau bahkan tidak dilakukan”. Artinya, kebijakan publik mencakup pilihan-pilihan tindakan maupun ketidaktindakan yang diambil oleh pemerintah.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menurut Nugroho (dalam Sore & Sobirin, 2017), kebijakan publik atau yang dalam literatur internasional dikenal sebagai public policy merupakan aturan atau regulasi yang mengatur kehidupan bermasyarakat. Aturan ini bersifat mengikat dan harus dipatuhi oleh seluruh warga masyarakat. Setiap pelanggaran akan mendapat hukuman sesuai dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan dan hukuman dijatuhkan di hadapan masyarakat oleh institusi yang bertugas memberikan sanksi.

Kebijakan publik dijalankan oleh administrasi negara yang dikelola oleh birokrasi pemerintah. Dalam kehidupan masyarakat di suatu wilayah hukum negara, sering kali muncul berbagai permasalahan. Untuk menjaga keseimbangan antara peran negara yang wajib memberikan layanan publik dan haknya untuk memungut pajak serta retribusi, pemerintah harus bertanggung jawab penuh atas kesejahteraan rakyatnya serta mampu mengatasi berbagai persoalan yang timbul. Kebijakan publik dibuat dan diterapkan sebagai upaya untuk menangani berbagai masalah dan isu yang berkembang di tengah masyarakat (Nugroho, 2014).

2.1.1 Tahap-Tahap Perumusan Kebijakan Publik

Ada beberapa tahap-tahap perumusan kebijakan publik menurut Dewi (2022):

1. Identifikasi masalah kebijakan publik: Pada tahap ini, masalah yang ada diangkat dan para pembuat kebijakan berusaha mengenali serta merumuskan secara jelas apa sebenarnya masalah kebijakan yang harus diselesaikan.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Penetapan agenda pemerintah: Dari banyaknya masalah yang ada di masyarakat, hanya sebagian kecil yang menjadi fokus perhatian para pembuat kebijakan. Pilihan ini kemudian membentuk agenda kebijakan yang akan diutamakan.
3. Penyusunan proposal kebijakan publik: Tahap ini melibatkan perancangan dan pengembangan serangkaian langkah atau tindakan yang diperlukan untuk mengatasi masalah yang telah diidentifikasi.
4. Pengesahan kebijakan publik: Setelah proposal disusun, dilakukan proses penyesuaian dan persetujuan bersama terhadap prinsip-prinsip dan standar yang telah disepakati agar kebijakan tersebut dapat diterima secara resmi.
5. Pelaksanaan kebijakan publik: Setelah disahkan oleh pihak yang berwenang, kebijakan tersebut siap untuk diterapkan dan dijalankan di lapangan sesuai dengan keputusan yang telah dibuat.
6. Evaluasi kebijakan publik: langkah akhir dari proses kebijakan. Evaluasi kebijakan publik dilakukan untuk mengetahui dampak kebijakan publik.

2.2 Implementasi Kebijakan Publik

Implementasi kebijakan publik merupakan salah satu tahapan penting dalam rangkaian proses kebijakan publik, yang sangat berpengaruh terhadap bagaimana suatu kebijakan benar-benar terasa manfaatnya bagi masyarakat dan dapat memperoleh dukungan serta penerimaan dari publik. Implementasi kebijakan mencakup penerapan berbagai program, kegiatan, serta tindakan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

operasional yang telah direncanakan guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan (Arafat, 2023).

Seperti yang dijelaskan oleh Muhammad Ridha Suaib dalam bukunya Pengantar Kebijakan Publik (2016), “Implementasi bukan sekadar tentang bagaimana keputusan politik diterjemahkan ke dalam prosedur rutin melalui birokrasi. Lebih dari itu, implementasi juga melibatkan berbagai dinamika seperti konflik, pengambilan keputusan, dan pertanyaan tentang siapa yang sebenarnya mendapatkan manfaat dari kebijakan tersebut. Oleh karena itu, tidak berlebihan jika dikatakan bahwa implementasi adalah bagian yang sangat vital dalam keseluruhan proses kebijakan”.

Selain itu, kebijakan yang diterapkan bisa saja mengalami perubahan agar lebih sesuai dengan kebutuhan kelompok atau individu tertentu. Hal ini berarti tujuan awal kebijakan bisa berubah arah. Karena dalam banyak kasus pelaksana kebijakan publik adalah para administrator publik, tidak mengherankan jika mereka sering kali menjadi pihak yang paling aktif dalam memodifikasi kebijakan demi kepentingan rezim yang berkuasa.

Secara sederhana, Jones (1994) mengartikan implementasi sebagai “menyelesaikan pekerjaan” atau “melakukan sesuatu.” Di balik kesederhanaan ungkapan ini, tersimpan makna bahwa implementasi kebijakan adalah proses yang memungkinkan kebijakan tersebut dijalankan dengan cara yang praktis dan mudah dipahami.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.2.1 Model Implementasi kebijakan

Banyak model yang digunakan untuk menganalisis implementasi kebijakan publik, namun untuk penelitian ini saya menggunakan model implementasi kebijakan dari George C. Edward III untuk menilai keberhasilan dari suatu penerapan kebijakan. Terdapat beberapa teori dari beberapa ahli mengenai implementasi kebijakan, yaitu:

1. Model George C. Edward III

Berdasarkan model implementasi kebijakan yang dirumuskan oleh George C. Edward III dalam Agustino (2017), menyoroti empat elemen utama yang sangat menentukan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kebijakan. Keempat elemen tersebut adalah: komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Berikut penjelasan dari masing-masing elemen tersebut:

a. Komunikasi

Komunikasi adalah proses manusia dalam menyampaikan ide, perasaan, harapan, atau pengalaman kepada orang lain. Dalam konteks pelaksanaan kebijakan, komunikasi memegang peranan yang sangat penting karena menjadi jembatan antara pemerintah dan masyarakat. Melalui komunikasi yang baik, dapat dipastikan bahwa kebijakan berjalan dengan efektif dan efisien tanpa merugikan pihak manapun. Keberhasilan implementasi sangat bergantung pada

pemahaman yang jelas antara pembuat kebijakan dan pelaksana mengenai tugas masing-masing, dan hal ini hanya bisa terwujud melalui komunikasi yang lancar dan tepat.

Menurut George C. Edward III, komunikasi merupakan faktor penting dalam implementasi kebijakan karena kebijakan hanya dapat dilaksanakan dengan baik apabila dipahami secara benar oleh para pelaksana. Komunikasi berkaitan dengan bagaimana kebijakan disampaikan dari pembuat kebijakan kepada pelaksana dan kelompok sasaran. Edward III membagi komunikasi menjadi tiga dimensi penting, yaitu: *transmission* (penyampaian informasi), *clarity* (kejelasan), dan *consistency* (konsistensi).

Pemahaman tentang tugas yang akan dikerjakan hanya dapat berjalan ketika komunikasi berlangsung dengan baik, sehingga setiap keputusan kebijakan dan aturan implementasi harus diteruskan kepada personil yang sesuai. Selain itu, kebijakan yang dikomunikasikan harus tepat, akurat, dan konsisten. Komunikasi diperlukan agar para pembuat kebijakan dan pelaksana semakin konsisten dalam menjalankan setiap kebijakan yang akan diterapkan di masyarakat.

Edward III membahas tiga aspek penting dalam proses komunikasi kebijakan.

1) Transmisi

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Transmisi adalah proses penyampaian informasi kebijakan dari pembuat kebijakan kepada pelaksana dan masyarakat sasaran. Kebijakan harus disampaikan melalui saluran yang tepat agar tidak terdistorsi. Jika transmisi tidak berjalan baik, pelaksana dapat salah memahami isi kebijakan atau bahkan tidak mengetahui adanya kebijakan tersebut.

2) Kejelasan

Kejelasan berkaitan dengan seberapa jelas isi kebijakan, tujuan, dan prosedur pelaksanaannya. Kebijakan yang tidak dirumuskan secara jelas akan menimbulkan kebingungan di kalangan pelaksana. Oleh karena itu, petunjuk pelaksanaan kebijakan harus mudah dipahami, tidak ambigu, dan tidak menimbulkan multiinterpretasi.

3) Konsistensi

Konsistensi berarti bahwa perintah, aturan, dan pedoman pelaksanaan kebijakan harus bersifat tetap dan tidak saling bertentangan. Instruksi yang berubah-ubah atau bertolak belakang akan menyulitkan pelaksana dalam menjalankan kebijakan secara optimal.

b. Sumber Daya

Menurut Edward III yang mempengaruhi keberhasilan implementasi suatu kebijakan adalah sumber daya. Sumber daya mencakup segala hal yang dibutuhkan untuk mendukung

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pelaksanaan suatu kebijakan atau program agar dapat berjalan secara efektif. Tanpa dukungan sumber daya yang memadai, kebijakan yang telah dirancang dengan baik berpotensi tidak terlaksana secara optimal di lapangan. Sumber daya dalam implementasi kebijakan meliputi staf, informasi, wewenang, serta fasilitas.

1) Staf

Staf adalah sumber daya manusia yang terlibat langsung dalam pelaksanaan kebijakan. Keberhasilan implementasi sangat dipengaruhi oleh jumlah, kemampuan, dan kompetensi staf. Staf yang tidak mencukupi atau tidak memiliki keterampilan yang memadai akan menghambat pelaksanaan kebijakan.

2) Informasi

Informasi, dalam implementasi kebijakan informasi mempunyai dua bentuk, yaitu Informasi yang berhubungan dengan cara melaksanakan kebijakan dan informasi mengenai data kepatuhan dari para pelaksana terhadap peraturan dan regulasi pemerintah yang telah ditetapkan.

3) Wewenang

Wewenang adalah legitimasi atau kekuasaan formal yang dimiliki pelaksana untuk menjalankan kebijakan. Tanpa wewenang yang jelas, pelaksana akan ragu dalam

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mengambil keputusan atau tindakan di lapangan, sehingga kebijakan tidak dapat dilaksanakan secara optimal.

4) Fasilitas

Fasilitas merupakan sarana dan prasarana pendukung yang dibutuhkan dalam pelaksanaan kebijakan. Fasilitas meliputi peralatan, gedung, dan lainnya, Keterbatasan fasilitas dapat menghambat efektivitas implementasi kebijakan.

c. Disposisi

Faktor ketiga yang turut memengaruhi keberhasilan pelaksanaan kebijakan adalah disposisi. Disposisi menurut Edward III adalah sikap, komitmen, dan kemauan para pelaksana kebijakan dalam menjalankan kebijakan yang telah ditetapkan. Disposisi mencerminkan sejauh mana pelaksana bersedia dan berkomitmen untuk melaksanakan kebijakan sesuai tujuan yang telah ditetapkan. Disposisi terdiri dari pengangkatan birokrat dan pemberian insentif.

1) Pengangkatan Birokrat

Pengangkatan birokrat berkaitan dengan penempatan aparat pelaksana kebijakan. Pelaksana yang dipilih harus memiliki kompetensi, integritas, dan kesesuaian dengan tugas yang diberikan. Penempatan birokrat yang tidak tepat dapat menyebabkan kebijakan tidak berjalan efektif.

2) Insentif

Insentif merupakan bentuk penghargaan atau dorongan yang diberikan kepada pelaksana kebijakan agar mereka termotivasi dalam menjalankan tugasnya. Insentif dapat berupa materi maupun non-materi. Pemberian insentif yang memadai akan meningkatkan komitmen dan kinerja pelaksana kebijakan.

d. Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi menurut Edward III berkaitan dengan susunan organisasi dan mekanisme kerja dalam pelaksanaan kebijakan. Struktur birokrasi yang baik akan mendukung koordinasi dan kelancaran implementasi kebijakan. Edward III menekankan dua aspek utama dalam struktur birokrasi, yaitu Standard Operating Procedure (SOP) dan fragmentasi.

1) Standard Operating Procedure (SOP)

SOP adalah pedoman atau prosedur kerja standar yang digunakan sebagai acuan bagi pelaksana kebijakan dalam menjalankan tugasnya. SOP bertujuan untuk menciptakan keseragaman tindakan, meningkatkan efisiensi, dan mengurangi kesalahan dalam pelaksanaan kebijakan.

2) Fragmentasi

Fragmentasi adalah pembagian tanggung jawab pelaksanaan kebijakan ke dalam beberapa unit atau lembaga. Pembagian tugas ini bertujuan untuk mempermudah pelaksanaan,

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

namun jika koordinasi antarunit tidak berjalan baik, fragmentasi justru dapat menghambat implementasi kebijakan.

2. Model Van Metter dan Van Horn

Van Meter dan Carl Van Horn dalam Syahrudin (2019) mengartikan implementasi kebijakan publik sebagai pelaksanaan atau aksi konkret yang dilakukan berdasarkan keputusan yang telah dibuat sebelumnya. Model ini menekankan bahwa: "Implementasi kebijakan berjalan secara bertahap dari kebijakan publik, pelaksana, dan hasil kebijakan publik". Beberapa faktor yang mempengaruhi proses kebijakan publik meliputi:

- a. Kegiatan implementasi dan komunikasi antar lembaga,
- b. Karakteristik dan agen pelaksana,
- c. Kondisi ekonomi, sosial dan politik,
- d. Sikap (disposition) dari pelaksana.

Implementasi kebijakan memerlukan dukungan dari berbagai sumber daya, termasuk anggaran dan insentif lainnya. Ketika dana yang tersedia tidak mencukupi, efektivitas pelaksanaan kebijakan cenderung menurun. Meskipun standar dan target telah ditetapkan dengan jelas, keberhasilan pelaksanaan tidak selalu terjamin jika komunikasi antar pelaksana dalam organisasi tidak berjalan dengan baik. Para pelaksana harus memahami tujuan utama kebijakan yang akan dijalankan, karena merekalah yang

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bertanggung jawab atas pelaksanaan tersebut.

Komunikasi sering menjadi aspek yang kompleks dan dapat menimbulkan kesalah pahaman. Oleh karena itu, dalam lingkungan organisasi publik, pimpinan perlu menyampaikan kebijakan secara jelas serta menciptakan suasana kerja yang kondusif agar staf dan pelaksana memiliki kemampuan dan motivasi yang sesuai dengan kebutuhan kebijakan publik.

3. Model Mazmanian dan Sabatier (1983)

Menurut Mazmanian dan Sabatier dalam Rahardian, (2022) pelaksanaan kebijakan mengacu pada proses mengimplementasikan keputusan yang telah ditetapkan sebelumnya. Menurut kedua ahli tersebut, implementasi kebijakan publik memiliki peran penting dalam mengenali berbagai variabel yang mempengaruhi pencapaian tujuan formal sepanjang proses pelaksanaan kebijakan. Variabel-variabel tersebut meliputi: tingkat kemudahan atau kesulitan masalah kebijakan publik yang akan dirumuskan; sejauh mana perubahan perilaku yang diinginkan dapat terjadi; kebutuhan akan pelaksanaan kebijakan yang terstruktur dengan tepat; serta faktor-faktor eksternal yang ikut mempengaruhi proses implementasi.

4. Model Ripley dan Franklin (1985)

Menurut Ripley dan Franklin (1985) terdapat tiga aspek utama yang menjadi tolak ukur keberhasilan dalam pelaksanaan kebijakan program, yaitu:

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Tingkat kepatuhan para aparatur pelaksana terhadap penerapan kebijakan.
- b. Keberhasilan implementasi dapat dilihat dari kelancaran pelaksanaan kegiatan sehari-hari tanpa adanya hambatan, dan
- c. Penerapan kebijakan yang efektif akan menghasilkan kinerja yang memuaskan bagi seluruh pihak, khususnya kelompok yang menjadi sasaran program.

Implementasi kebijakan sering kali menjadi tahapan yang paling menantang, sebab pada tahap inilah berbagai permasalahan yang mungkin belum terdeteksi saat penelitian kebijakan akan muncul di lapangan. Oleh karena itu, penting untuk menilai apakah kebijakan tersebut telah diatur secara sistematis dalam pelaksanaannya, apakah hasil kebijakan telah dijabarkan menjadi langkah-langkah operasional yang lebih konkret, serta apakah kebijakan tersebut siap dan mudah diterapkan demi mencapai tujuan bersama yang diharapkan (Tresiana & Duadji, 2019)

2.3 Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu)

Posyandu (Pos Pelayanan Terpadu) adalah Program kesehatan yang dikerjakan langsung oleh warga dengan memanfaatkan kemampuan dan dana yang ada di lingkungan mereka sendiri. Warga berperan sebagai pelaksana, pengurus, dan juga yang menerima manfaat dari program ini. Tujuannya adalah untuk membuat masyarakat lebih mandiri dalam menjaga kesehatan dan memudahkan mereka mendapatkan layanan kesehatan sederhana,

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

terutama untuk ibu-ibu, bayi, anak kecil, dan lansia. Posyandu biasanya dilaksanakan secara rutin setiap bulan di tingkat desa atau kelurahan, dengan kegiatan seperti penimbangan balita, imunisasi, pemberian makanan tambahan, pemeriksaan kesehatan ibu hamil, serta pelayanan kesehatan dasar untuk lansia (Kemenkes RI, 2023).

2.3.1 Tujuan Posyandu

Tujuan posyandu antara lain:

1. Menurunkan angka kematian bayi (AKB), angka kematian ibu (ibu hamil), melahirkan dan nifas.
2. Membudayakan NKBS
3. Meningkatkan peran serta masyarakat untuk mengembangkan kegiatan kesehatan dan KB serta kegiatan lainnya yang menunjang untuk tercapainya masyarakat sehat sejahtera.
4. Berfungsi sebagai wahana gerakan reproduksi keluarga sejahtera, gerakan ketahanan keluarga dan gerakan ekonomi keluarga sejahtera.

2.3.2 Sasaran Posyandu

1. Ibu hamil dan menyusui.
2. Bayi dan balita (0-5 tahun).
3. Usia sekolah, remaja.
4. Usia produktif dan
5. Lansia (Posyandu Lansia/Posbindu).

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.3.3 Pelaksanaan Layanan Posyandu

Pada hari buka posyandu dilakukan pelayanan masyarakat dengan sistem 5 meja yaitu:

Meja I : Pendaftaran

Meja II : Penimbangan

Meja III : Pengisian KMS

Meja IV : Penyuluhan perorangan berdasarkan KMS

Meja V : Pemeriksaan oleh tenaga kesehatan (bidan, perawat, dll.).

2.3.4 Pelaksana Posyandu

Pengurus Posyandu mengacu pada ketentuan dalam Permendagri Nomor 18 tahun 2018 tentang LKD, yang terdiri atas ketua, sekretaris, bendahara dan bidang sesuai kebutuhan (kader). Pengurus ditetapkan Kepala desa dengan masa jabatan 5 tahun dan dapat diperpanjang 2 kali berturut-turut atau tidak berturut-turut, pengurus dilarang merangkap jabatan LKD/K lainnya dan dilarang menjadi anggota partai politik. Kader posyandu jumlahnya tidak mengikat, sekurang-kurangnya 5 orang dan bisa lebih sesuai kebutuhan wilayah setempat (Amrina et al., 2020).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.4 Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No	Sumber	Hasil	Perbedaan
1	Wahiddinor, Jumaidi dan M. Arsyad (2024) Implementasi Program Posyandu Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Hulu Sungai Utara Studi Kasus Kecamatan Amuntai Utara (Upt Puskesmas Sungai Turak Dan Guntung)	Hasil penelitian menunjukkan baik. Hal tersebut dapat dilihat pada:aspek 1) Kemampuan Organisasi dilihat pada indikator kemampuan teknis baik, Indikator SOP baik. 2) Informasi dilihat pada indikator informasi atau sosialisasi baik,. 3) Dukungan dilihat pada indikator sikap masyarakat baik. 4) Pembagian potensi dilihat pada indikator pembagian wewenang baik, dan indikator komitmen. baik, Faktor pendukung adanya koordinasi yang bagus antara Dinas Kesehatan dengan UPT Puskesmas Sungai Turak dan Guntung..	Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Amuntai Utara kabupaten Hulu Sungai Utara, dengan menggunakan teori Warwic dalam Yulianto Kadji. Sedangkan penulis dilakukan di Desa Tanjung Kecamatan Koto Kampar Hulu dengan menggunakan teori Edward III
2	Evi Lorita, Harius Eko Saputra, dan Fitri Anggraini (2023) Analisis Implementasi kebijakan Pelayanan Posyandu di Desa Lawang Agung.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa kader dan penerima layanan masyarakat. Evaluasi kebijakan dilakukan berdasarkan model Wayne Parsons, yang mencakup evaluasi formatif dan evaluasi sumatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar program Posyandu, seperti pelayanan gizi ibu dan anak, pengendalian penyakit, perilaku hidup bersih dan sehat, serta pelayanan kesehatan lansia, telah terintegrasi dan berjalan dengan efektif. Namun, beberapa layanan seperti Pos PAUD belum dilaksanakan secara optimal karena kurangnya sosialisasi dan rendahnya kesadaran masyarakat. Evaluasi sumatif menunjukkan adanya	Penelitian ini dilakukan di Desa Lawang Agung dengan menggunakan teori Wayne Parsons dan penelitian ini berfokus pada evaluasi kebijakan. Sedangkan penulis dilakukan di Desa Tanjung Kecamatan Koto Kampar Hulu dengan menggunakan teori Edward III dan berfokus pada proses implementasi program Posyandu.

No	Sumber	Hasil	Perbedaan
		peningkatan yang signifikan pada indikator kesehatan masyarakat, seperti penurunan angka kematian ibu dan bayi serta meningkatnya kesadaran terhadap pola hidup sehat.	
3	Muharrammah Isnaini, Zuhrina Aidha, Khairunnisa, Nabilla Yurisna Siregar (2024) Analisis Implementasi Program Posyandu Di Desa Kolam Kecamatan Percut Sei Tuan	Hasil penelitian menunjukkan bahwa posyandu di wilayah kerja puskesmas di desa kolam kecamatan percut sei tuan secara rutin dilaksanakan setiap satu bulan sekali pada tanggal 6. Para kader posyandu dan bidan desa aktif dalam melaksanakan tugas nya. Pemberian imunisasi di Posyandu belum maksimal karena masih banyak orang tua yang tidak mau anaknya diimunisasi dengan alasan antara lain takut demam setelah diimunisasi, imunisasi tidak memberi manfaat apapun karena anaknya yang lain tetap sehat walaupun tidak diimunisasi,serta imunisasi itu haram.	Penelitian ini dilakukan di Desa Kolam Kecamatan Percut Sei Tuan dan penelitian ini hanya berfokus pada balita. Sedangkan penulis dilakukan di Desa Tanjung Kecamatan Koto Kampar Hulu dan fokusnya pada semua masyarakat.
4	Tri Siswati, Yustiana Olfah, Jutharat Attawet, Nurhdayat dan Lukman (2023) Menilai Kesiapan Kader Posyandu Dalam Mengimplementasikan Pelayanan Kesehatan Primer Terpadu di Yogyakarta, Indonesia.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa Sebagian besar kader (63,7%) berusia 41–50 tahun, 60,2% telah menyelesaikan pendidikan tingkat SMA, dan 72,6% berstatus sebagai ibu rumah tangga. Para kader menunjukkan kesiapan yang tinggi dalam pelaksanaan ILP, dengan kebutuhan utama berupa peningkatan logistik, pendanaan, pelatihan, dan partisipasi masyarakat. Selain itu, diperlukan peningkatan literasi dan keterampilan kader dalam memberikan pelayanan kesehatan di sepanjang siklus kehidupan, seperti imunisasi, pemantauan tumbuh kembang, serta pemberian makan bayi dan anak.	Penelitian ini dilakukan di Yogyakarta dan penelitian ini berfokus pada kesiapan kader Posyandu. Sedangkan penulis dilakukan di Desa Tanjung Kecamatan Koto Kampar Hulu dan penelitian penulis berfokus pada implementasi program Posyandu, meliputi aspek komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

No	Sumber	Hasil	Perbedaan
5	Annisa Dewi Rachmadini dan Amirul Mukminin (2025) Pengaruh pelatihan Kader posyandu pada pelaksanaan Posyandu Sahabat Masyarakat di Klaten	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelatihan kader berpengaruh signifikan terhadap pelaksanaan program, yang dibuktikan melalui analisis statistik. Data yang digunakan terdistribusi normal (Sig. 0,200 > 0,05) dan lolos uji heteroskedastisitas, mengonfirmasi validitas model regresi. Uji linieritas menunjukkan adanya hubungan linier antara pelatihan kader dan implementasi program (Sig. 0,071 > 0,05), sementara koefisien determinasi ($R^2 = 0,653$) mengindikasikan bahwa 65,3% variasi dalam implementasi program dapat dijelaskan oleh pelatihan kader. Analisis regresi sederhana juga menegaskan pengaruh signifikan pelatihan kader terhadap pelaksanaan program (Sig. 0,000 < 0,05).	Penelitian ini dilakukan di Klaten, Jawa Tengah, dengan menggunakan metode penelitian kuantitatif dan penelitian ini hanya berfokus pada pelatihan kader posyandu. Sedangkan penulis dilakukan di Desa Tanjung Kecamatan Koto Kampar Hulu, dengan menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif dan penelitian penulis berfokus pada implementasi program Posyandu, meliputi aspek komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi.

2. Pandangan Islam Terhadap Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu)

Posyandu merupakan salah satu bentuk kegiatan pelayanan sosial dan kesehatan yang diselenggarakan berbasis masyarakat dengan tujuan meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara berkelanjutan. Keberadaan Posyandu tidak hanya berfungsi sebagai tempat pelayanan, tetapi juga sebagai wadah partisipasi masyarakat dalam mendukung program pemerintah di tingkat desa. Pelaksanaan Posyandu membutuhkan keterlibatan berbagai pihak, seperti pemerintah desa, tenaga kesehatan, kader, dan masyarakat, agar

kegiatan yang dilakukan dapat berjalan secara optimal dan berkesinambungan.

Dalam Al-Qur'an Surat An-Nisa ayat 9 dijelaskan tentang tanggung jawab yang tercermin dalam kesadaran setiap pihak yang berbunyi sebagai berikut:

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعْفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ
وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا ﴿٩﴾

Artinya; *“Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar.”*

Selain itu, Posyandu juga mencerminkan nilai ta'awun (tolong-menolong) dan pelayanan sosial, di mana masyarakat, kader, dan pemerintah bekerja sama demi kemaslahatan bersama. Seperti yang dijelaskan dalam Al-Qur'an Surat Al-Maidah ayat 2 yang berbunyi sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحْلُوا شَعَائِرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَائِدَ
وَلَا آمِنِينَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَنْتَعُونَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا
وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَا نُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا
عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ
الْعِقَابِ ﴿٢﴾

Artinya: *“Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan taqwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran.”*

Kandungan kedua ayat tersebut menegaskan pentingnya sikap

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tanggung jawab dan tolong-menolong dalam kehidupan bermasyarakat. Nilai tanggung jawab tercermin dalam kesadaran setiap pihak untuk menjalankan peran dan kewajibannya secara konsisten demi tercapainya tujuan bersama. Dalam konteks Posyandu, tanggung jawab ini terlihat dari komitmen pengelola, kader, serta pihak terkait dalam memastikan kegiatan Posyandu berjalan secara teratur dan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.

Selain itu, perintah untuk saling tolong-menolong dalam kebaikan dan ketakwaan sejalan dengan prinsip dasar penyelenggaraan Posyandu yang mengedepankan kerja sama dan kepedulian sosial. Pelaksanaan Posyandu tidak dapat berjalan secara optimal tanpa adanya dukungan dan partisipasi masyarakat, baik dalam bentuk keterlibatan langsung maupun dukungan moral. Melalui semangat tolong-menolong, Posyandu menjadi sarana untuk memperkuat solidaritas sosial serta mewujudkan pelayanan yang bermanfaat bagi kepentingan bersama.

2.6 Defenisi Konsep

Penjelasan mengenai definisi konsep ini bertujuan untuk memberikan kerangka pemikiran yang jelas, menghindari adanya tumpang tindih makna, serta menetapkan batasan yang tegas pada setiap istilah yang digunakan. Hal ini penting agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam pembahasan selanjutnya.

Berikut adalah beberapa konsep utama yang akan digunakan:

- a. Kebijakan Publik adalah serangkaian tindakan atau aktivitas yang melibatkan pembuat keputusan dan program perencanaan oleh pihak pemerintah.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Implementasi Kebijakan Publik adalah pelaksanaan atau penerapan suatu rencana, kebijakan, program, atau ide ke dalam tindakan nyata di lapangan. Implementasi merupakan tahap penting setelah perencanaan, di mana berbagai strategi, prosedur, dan langkah-langkah yang telah disusun sebelumnya dijalankan secara konkret untuk mencapai tujuan yang diinginkan.
- c. Posyandu (Pos Pelayanan Terpadu) adalah Program kesehatan yang dikerjakan langsung oleh warga dengan memanfaatkan kemampuan dan dana yang ada di lingkungan mereka sendiri. Warga berperan sebagai pelaksana, pengurus, dan juga yang menerima manfaat dari program ini. Tujuannya adalah untuk membuat masyarakat lebih mandiri dalam menjaga kesehatan dan memudahkan mereka mendapatkan layanan kesehatan sederhana, terutama untuk ibu-ibu, bayi, anak kecil, dan lansia.

2.7 Konsep Operasional

Konsep operasional adalah konsep yang didasarkan atas sifat-sifat yang didefinisikan yang dapat diamati sehingga apa yang dilakukan peneliti terbuka untuk diuji kembali oleh orang lain.

Tabel 2.2
Indikator Penelitian

KONSEP	INDIKATOR	SUB INDIKATOR
Implementasi Program Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) Di Desa Tanjung Kecamatan Koto Kampar Hulu (Menurut Teori George C Edward III)	1. Komunikasi	1. Transmisi 2. Kejelasan 3. Konsistensi
	2. Sumber daya	1. Sumber daya manusia 2. Informasi 3. Wewenang 4. Fasilitas
	3. Disposisi	1. Pengangkatan birokrat 2. Insentif
	4. Struktur birokrasi	1. Standard Operating

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

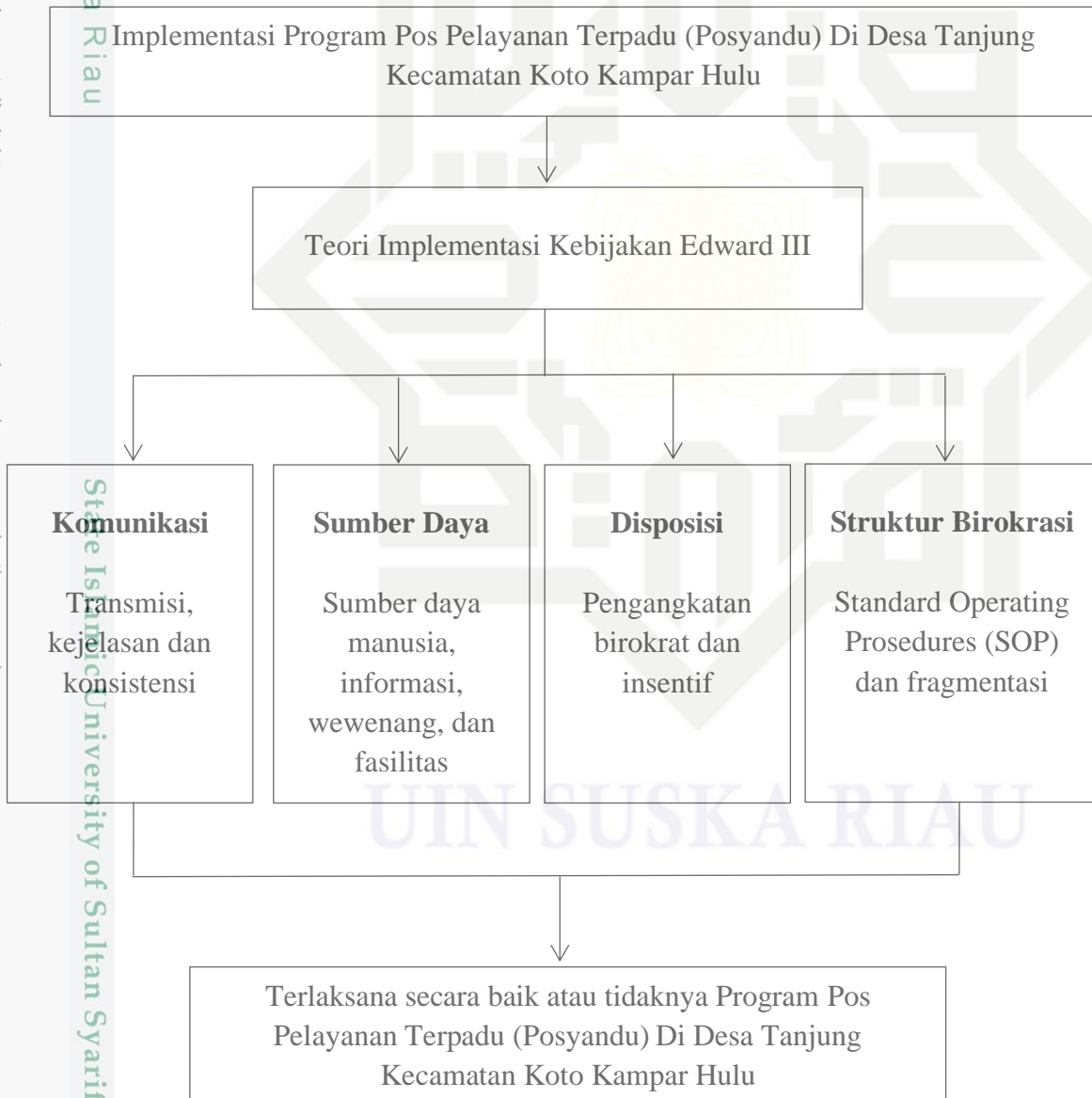
KONSEP	INDIKATOR	SUB INDIKATOR
		Procedure (SOP)
		2. Fragmentasi

Sumber: George C Edward III dalam Agustino (2017)

2.8 Kerangka Pemikiran

Berdasarkan dukungan teori yang diperoleh dan dijadikan sebagai rujukan konseptual maka dapat disusun kerangka pemikiran sebagai berikut:

**Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran**



Sumber: Adaptasi Implementasi Model George C. Edward III

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti menerapkan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif yang memberikan penjelasan tentang fenomena dari subjek yang diteliti, lalu diuraikan dengan menggunakan kalimat-kalimat yang tertera baik secara tertulis maupun lisan. Penelitian kualitatif merupakan pendekatan yang berlandaskan pada filosofi postpositivisme, yang digunakan untuk mengkaji situasi objek dalam keadaan alami (Sugiyono, 2019).

Penelitian kualitatif bertujuan untuk menemukan, menggambarkan, dan menjelaskan kualitas atau karakteristik dari pengaruh sosial yang tidak dapat diukur atau dijelaskan secara kuantitatif. Berbeda dengan penelitian kuantitatif yang berawal dari teori, penelitian kualitatif justru dimulai dari pengumpulan data dan menggunakan teori yang sudah ada sebagai alat untuk menjelaskan temuan tersebut.

3.2 Lokasi Dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Desa Tanjung, Kecamatan Koto Kampar Hulu, Kabupaten Kampar. Alasan pemilihan lokasi ini karena merupakan daerah asal peneliti, sehingga memudahkan dalam pengumpulan data selama proses penelitian berlangsung. Peneliti ingin mengamati secara langsung bagaimana pelaksanaan program posyandu bagi lansia di Desa Tanjung tersebut. Penelitian ini dijadwalkan berlangsung mulai bulan Oktober 2025 hingga selesai.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3.3 Jenis Dan Sumber Data

Dalam penelitian ini, data yang digunakan terbagi menjadi dua jenis:

1. Data Primer

Data primer adalah data-data utama yang didapatkan dari subjek penelitian secara langsung berupa data yang otentik, objektif, dan reliabel, sehingga menjadi dasar utama dalam menyelesaikan permasalahan yang diteliti. Contoh data primer meliputi hasil wawancara dengan subjek, angket, tes, dan lain sebagainya.

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari berbagai dokumen, literatur, dan sumber tertulis lainnya yang relevan dengan objek penelitian. Contohnya adalah dokumen instansi, buku, artikel, jurnal baik nasional maupun internasional, serta peraturan-peraturan perundang-undangan.

3.4 Informan Penelitian

Dalam memilih informan, peneliti menggunakan teknik purposive sampling, yaitu memilih informan yang dianggap memiliki pengetahuan atau keahlian khusus yang relevan dengan bidang penelitian. Dengan cara ini, data yang diperoleh diharapkan benar-benar akurat dan mencerminkan kondisi nyata. Informan yang dipilih adalah mereka yang dianggap paling memahami dan menguasai topik yang sedang diteliti.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel 3.1
Informan Penelitian

No	Informan Penelitian	Jumlah Informan Penelitian
1	Kepala Desa	1
2	Petugas Kesehatan Desa / Bidan Desa	1
3	Ketua Kader posyandu Dwi Karya	3
4	Masyarakat yang mengikuti Posyandu Dwi Karya.	5
Jumlah		10 orang

Sumber: Data Olahan Peneliti, 2025

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data penelitian ini, penulis menggunakan teknik pengumpulan data dengan menggunakan 3 (tiga) cara yaitu:

1. Wawancara

Metode wawancara pengumpulan data ini memungkinkan penulis berkomunikasi secara langsung dengan informan melalui tanya jawab untuk mendapatkan informasi tambahan.

2. Observasi

Untuk mendapatkan informasi dan data untuk memecahkan masalah penelitian, penulis melakukan pengamatan lapangan secara langsung.

3. Dokumentasi

Yaitu fakta yang tersimpan dalam bentuk surat menyurat, berkas, laporan, atau file, dan sifat utamanya tidak terbatas pada ruang dan waktu, memungkinkan peneliti untuk mengetahui peristiwa masa lalu..

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3.6 Teknik Analisis Data

Analisa deskriptif kualitatif digunakan untuk menganalisis data yang dibutuhkan dalam penelitian ini. Analisa data adalah upaya untuk mengorganisir data, mengorganisasikannya, mengubahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mengintegrasikan mencari dan mempelajari pola, melihat apa yang digambarkan dan apa yang dapat dipelajari, dan mempelajari apa yang dapat dipelajari oleh orang lain.

Penelitian ini menggunakan analisis data deskriptif kualitatif. Artinya, hasil penelitian akan memberikan gambaran yang jelas dan terorganisir berdasarkan data empiris yang dikumpulkan di lapangan melalui wawancara.

Untuk menganalisis data, peneliti menggunakan metode berikut:

1. Reduksi data, yang berarti memilih dan mengurutkan elemen yang penting untuk menggambarkan masalah.
2. Penyajian data, untuk menilai data yang dikumpulkan dalam penelitian ini, dapat digunakan uraian singkat, gagasan, dan hubungan antar kategori dan subjeknya.
3. Penarikan kesimpulan, juga dikenal sebagai verifikasi, adalah penilaian kesalahan pada catatan di lapangan atau kesalahan dapat ditinjau seperti data yang diuji kebenarannya dan dicocokkan melalui validasi.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV GAMBARAN UMUM TEMPAT PENELITIAN

4.1 Gambaran Singkat Desa Tanjung Kecamatan Koto Kampar Hulu

4.1.1 Keadaan Geografis Desa Tanjung

Desa Tanjung adalah salah satu desa tertua di kecamatan XIII Koto Kampar, yang telah ada sejak sebelum kerajaan Muara Takus berdiri. Sejarah mencatat bahwa masyarakat Desa Tanjung ikut terlibat dalam pembangunan candi Muara Takus, menunjukkan bahwa desa ini sudah ada sebelum abad ke-7, tepatnya sebelum tahun 600 M.

Saat ini, Kecamatan XIII Koto Kampar telah dibagi menjadi dua kecamatan, yaitu Kecamatan XII Koto Kampar dan Koto Kampar Hulu. Pembagian ini diresmikan oleh Bupati Kampar, Drs. Burhanuddin Husin, MM pada hari Jumat, 11 Juni 2010, dengan ibukota Koto Kampar Hulu yang terletak di Desa Tanjung.

Desa Tanjung (Kantor Desa Tanjung) berlokasi 2 Km dari Kantor Kecamatan Koto Kampar Hulu, sementara jarak ke ibukota Kabupaten adalah 60 Km dan ke ibukota Provinsi mencapai 120 Km. Awalnya, Desa Tanjung dikenal dengan nama Ujung Tanjung, yang diberikan oleh Datuk Godang Cincin. Sejarah mencatat bahwa dia adalah pendiri Desa Tanjung (sebelum abad ke-7) karena:

1. Desa Tanjung dikelilingi oleh Sungai Kampar, yang membuatnya menonjol di tengah aliran sungai.
2. Terdapat sebatang bunga tanjung di tengah Desa Tanjung, yang

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

diyakini sudah ada sejak desa didirikan.

Akibat adanya perubahan dalam masyarakat, desa ini kemudian lebih dikenal dengan nama Tanjung, yang hingga kini masih digunakan. Desa Tanjung memiliki luas wilayah 30 Km x 25 Km, dengan area pemukiman seluas 4 Km x 3 Km. Suhu udara di daerah ini bervariasi antara 21 °C hingga 34 °C, dengan curah hujan mencapai 2000 mm hingga 3000 mm per tahun.

Topografi Desa Tanjung bervariasi dari datar hingga bergelombang dan berbukit, dengan produktivitas tanah yang tergolong tinggi, sehingga mendukung pertumbuhan berbagai jenis tanaman dengan baik.

Dalam hal batas-batas wilayah, Desa Tanjung berbatasan dengan:

1. Sebelah utara berbatasan dengan Desa Tabing dan Desa Gunung Bungsu.
2. Sebelah timur berbatasan dengan Desa Muara Takus.
3. Sebelah selatan berbatasan dengan Desa Muara Takus dan Nagari Gunung Malintang (Sumatera Barat).
4. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Tabing dan Nagari Muara Paiti Sumatera Barat).

4.1.2 Keadaan Demografis Desa Tanjung

Kondisi demografis Desa Tanjung menggambarkan keadaan penduduk yang menetap di wilayah tersebut. Berdasarkan data yang diperoleh, jumlah penduduk Desa Tanjung tercatat sebanyak 5.861 jiwa

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dengan jumlah Kepala Keluarga (KK) sebanyak 1.603 KK. Data demografis ini digunakan sebagai dasar untuk mengetahui karakteristik penduduk serta sebagai bahan pertimbangan dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan desa. Adapun klasifikasi penduduk Desa Tanjung dijelaskan sebagai berikut.

A. Menurut Jenis Kelamin

Pengelompokan penduduk berdasarkan jenis kelamin bertujuan untuk mengetahui perbandingan jumlah penduduk laki-laki dan perempuan di Desa Tanjung. Untuk memperoleh gambaran yang lebih jelas, pembagian penduduk menurut jenis kelamin disajikan pada Tabel 4.1 berikut.

Tabel 4.1
Pembagian Penduduk Desa Tanjung Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Jumlah	Persentase (%)
1.	Laki-laki	2.950	50,3
2.	Perempuan	2.911	49,7
Jumlah		5.861	100

Sumber: Kantor Desa Tanjung 2025

Berdasarkan Tabel 4.1 tersebut, dapat diketahui bahwa jumlah penduduk laki-laki di Desa Tanjung sebanyak 2.950 jiwa atau sebesar 50,3% dari total penduduk. Sementara itu, jumlah penduduk perempuan tercatat sebanyak 2.911 jiwa atau 49,7%. Data ini menunjukkan bahwa persentase penduduk laki-laki sedikit lebih tinggi dibandingkan dengan penduduk perempuan.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa gambaran penduduk Desa Tanjung berdasarkan jenis kelamin relatif seimbang, meskipun jumlah penduduk laki-laki lebih dominan. Kondisi ini

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mencerminkan struktur penduduk yang cukup stabil dan berpotensi mendukung pelaksanaan berbagai program pembangunan serta kegiatan pelayanan masyarakat di Desa Tanjung.

B. Agama

Pengelompokan penduduk Desa Tanjung berdasarkan agama dilakukan untuk mengetahui kondisi kepercayaan yang dianut oleh masyarakat. Data penduduk menurut agama disajikan pada tabel berikut.

Tabel 4.2
Pembagian Penduduk Desa Tanjung Berdasarkan Agama Yang Dianut

No	Agama	Jumlah	Persentase (%)
1.	Islam	5.861	100
2.	Kristen/katholik/protestan	-	-
3.	Hindu	-	-
4.	Budha	-	-
Jumlah		5.861	100

Sumber: Kantor Desa Tanjung 2025

Berdasarkan Tabel 4.2 tersebut, dapat diketahui bahwa seluruh penduduk Desa Tanjung menganut agama Islam, yaitu sebanyak 5.861 jiwa atau 100% dari total penduduk. Sementara itu, tidak terdapat penduduk yang beragama Kristen, Katolik, Hindu, maupun Buddha. Hal ini menunjukkan bahwa kondisi keagamaan masyarakat Desa Tanjung bersifat homogen.

C. Jumlah Sarana Rumah Ibadah

Sarana rumah ibadah merupakan fasilitas yang berfungsi untuk mendukung kegiatan keagamaan masyarakat. Ketersediaan sarana rumah ibadah di Desa Tanjung dapat dilihat pada tabel

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berikut.

Tabel 4.3
Jumlah Sarana Rumah Ibadah

No	Sarana Ibadah	Jumlah
1.	Mesjid	4
2.	Musholla	14
Jumlah		18

Sumber: Kantor Desa Tanjung 2025

Berdasarkan Tabel 4.3 tersebut, diketahui bahwa sarana rumah ibadah di Desa Tanjung terdiri dari 4 unit masjid dan 14 unit musholla, sehingga total sarana rumah ibadah berjumlah 18 unit. Data ini menunjukkan bahwa fasilitas rumah ibadah di Desa Tanjung telah tersedia dan dapat dimanfaatkan oleh masyarakat dalam menjalankan kegiatan keagamaan.

D. Sarana Objek Wisata

Sarana objek wisata di Desa Tanjung merupakan potensi desa yang dapat mendukung kegiatan pariwisata dan pengembangan ekonomi masyarakat. Data mengenai sarana objek wisata yang terdapat di Desa Tanjung disajikan pada tabel berikut.

Tabel 4.4
Sarana Objek Wisata

No	Objek Wisata	Jumlah
1	Arung Jeram Sungai Kopu	1
2	Air Terjun Putri Kayangan	1
3	Air Terjun Panisan	1
4	Air Terjun Batu Hidung Sungai Kopu	1
5	Air Terjun Ompang	1
6	Bukit Panglatu	1
7	Puncak Paralayang	1
8	Pulau Rambai (Lokasi Perkemahan Dan Balimau Kasai)	1
9	Pulau Petai (Hamparan Batu Dan Pasir)	1
Jumlah		9

Sumber: Kantor Desa Tanjung 2025

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berdasarkan Tabel 4.4 tersebut, diketahui bahwa Desa Tanjung memiliki 9 objek wisata yang tersebar di beberapa lokasi. Objek wisata tersebut meliputi Arung Jeram Sungai Kopu, Air Terjun Putri Kayangan, Air Terjun Panisan, Air Terjun Batu Hidung Sungai Kopu, Air Terjun Ompang, Bukit Anglatu, Puncak Paralayang, Pulau Rambai (lokasi perkemahan dan Balimau Kasai), serta Pulau Petai (hamparan batu dan pasir). Masing-masing objek wisata tercatat sebanyak satu lokasi.

E. Jumlah Sarana Pendidikan

Sarana pendidikan merupakan faktor penting dalam mendukung proses pembelajaran masyarakat. Untuk mengetahui ketersediaan sarana pendidikan di wilayah penelitian, maka disajikan data jumlah sarana pendidikan sebagaimana terlihat pada Tabel berikut.

Tabel 4.5
Jumlah Sarana Pendidikan

No	Nama Sarana Pendidikan	Keterangan	Jumlah
1.	Sekolah Menengah Atas (SMA)	Negeri	1
2	MA Rahmatul Hidayah	Yayasan	1
3	Sekolah Menengah Pertama (SMP)	Negeri	1
4	MTS Rahmatul Hidayah	Yayasan	1
5	Sekolah Dasar (SD)	Negeri	3
6	Madrasah Diniyah Awaliyah (MDA)	Swasta	3
7	TK Dwi Karya	Yayasan	1
8	PAUD Permata Ibu	Yayasan	1
9	Taman Pendidikan Al-Qurán (TPA)	Swadaya	14
Jumlah			26

Sumber: Kantor Desa Tanjung 2025

Berdasarkan Tabel 4.5 tersebut, jumlah sarana pendidikan di wilayah penelitian sebanyak 26 unit yang terdiri dari berbagai

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

jenjang pendidikan. Sarana pendidikan formal meliputi SMA, MA, SMP, dan SD, sedangkan sarana pendidikan nonformal dan keagamaan meliputi MDA, TK, PAUD, serta TPA. Kondisi ini menunjukkan bahwa sarana pendidikan di wilayah penelitian cukup beragam dan mendukung kebutuhan pendidikan masyarakat.

F. Keadaan Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Tingkat pendidikan penduduk dapat menggambarkan kualitas sumber daya manusia di suatu wilayah. Oleh karena itu, data keadaan penduduk menurut tingkat pendidikan disajikan pada Tabel berikut.

Tabel 4.6
Keadaan Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah	Persentase (%)
1	Tamatan SD	2.487	42,43
2	Tamatan SMP Sederajat	776	13,24
3	Tamatan SMA Sederajat	574	9,8
4	Tamatan Perguruan tinggi	255	4,36
5	Tidak Sekolah/ Tidak Tamat SD	219	3,73
6	Belum Sekolah	1.550	26,44
Jumlah		5.861	100

Sumber: Kantor Desa Tanjung 2025

Berdasarkan Tabel 4.6 tersebut, jumlah penduduk di wilayah penelitian sebanyak 5.861 jiwa. Penduduk dengan pendidikan tamat SD merupakan kelompok terbesar, yaitu 42,43%, diikuti oleh penduduk yang belum sekolah sebesar 26,44%. Sementara itu, penduduk yang berpendidikan perguruan tinggi hanya 4,36%, yang menunjukkan bahwa tingkat pendidikan penduduk masih perlu ditingkatkan.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

G. Pemerintah Desa

1. Daftar Nama Pemerintahan Desa

Pemerintahan desa merupakan unsur penyelenggara pemerintahan di tingkat desa yang memiliki peran penting dalam pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat. Untuk mengetahui susunan aparatur pemerintahan desa di wilayah penelitian, maka disajikan daftar nama pemerintahan desa pada Tabel berikut.

Tabel 4.7
Daftar Nama Pemerintahan Desa

NO	NAMA	JABATAN
1	Nasrullah, S.Sos	Kepala Desa
2	MHD Yamin, S.TP	Sekretaris Desa
3	Abdul Rahman	Kasi Pemerintahan
4	Pitriadi	Kasi Kesejahteraan
5	Melly Dwi Putri	Kasi Pelayanan
6	Fitra Hayati	Kaur Keuangan
7	Mhd. Hafis, S.H	Kaur Perencanaan
8	Sri Wahyuni	Kaur Tata Usaha dan Umum

Sumber: Kantor Desa Tanjung 2025

Berdasarkan Tabel 4.7 tersebut, struktur pemerintahan desa terdiri dari Kepala Desa, Sekretaris Desa, kepala seksi (Kasi), dan kepala urusan (Kaur). Susunan aparatur pemerintahan desa tersebut menunjukkan adanya pembagian tugas dan tanggung jawab yang jelas dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat desa.

2. Daftar Nama Kepala Dusun

Kepala dusun merupakan perangkat desa yang bertugas membantu kepala desa dalam penyelenggaraan pemerintahan di

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

wilayah dusun. Adapun daftar nama kepala dusun di wilayah penelitian disajikan pada Tabel berikut.

Tabel 4.8
Daftar Nama Kepala Dusun Desa Tanjung

No	Nama	Jabatan
1	Hadisman	Kepala Dusun I
2	Edi Siswarianto	Kepala Dusun II
3	Jamahar	Kepala Dusun III
4	Idamra	Kepala Dusun IV
5	Hardianto	Kepala Dusun V
6	Zainal	Kepala Dusun VI
7	Ario Susanto	Kepala Dusun VII

Sumber: Kantor Desa Tanjung 2025

Berdasarkan Tabel 4.8 tersebut, terdapat 7 kepala dusun yang masing-masing bertanggung jawab atas wilayah Dusun I hingga Dusun VII. Keberadaan kepala dusun tersebut berperan penting dalam koordinasi pemerintahan desa dan pelayanan kepada masyarakat di tingkat dusun.

4.2 Gambaran Umum Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) di Desa Tanjung Kecamatan Koto Kampar Hulu

Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) di Desa Tanjung dibentuk sebagai bagian dari upaya pemerintah dalam meningkatkan pelayanan kesehatan dasar bagi masyarakat. Keberadaan Posyandu dilatarbelakangi oleh kebutuhan masyarakat akan pelayanan kesehatan yang mudah diakses serta sebagai langkah pencegahan terhadap berbagai permasalahan kesehatan, seperti gizi buruk, angka kematian ibu dan bayi, serta rendahnya pemantauan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tumbuh kembang balita.

Posyandu di Desa Tanjung sudah berjalan aktif sejak tahun 2016 dan terbagi menjadi tiga posyandu, yaitu Posyandu Dwi karya 1 yang berlokasi di Poskesdes, Posyandu Dwi karya 2 berlokasi di PAUD Permata Ibu, dan Posyandu Dwi Karya 3 yang berlokasi di rumah salah satu kader posyandu. Pelaksanaan kegiatan posyandu ini fleksibel, terkadang dilaksanakan di posko masing-masing posyandu, namun ada kalanya juga digelar di Poskesdes sebagai pusat pelayanan kesehatan desa.

Pada awal pelaksanaannya, kegiatan Posyandu di Desa Tanjung masih dilakukan secara sederhana dengan melibatkan kader kesehatan dari masyarakat setempat yang bekerja sama dengan bidan desa serta petugas kesehatan dari puskesmas. Kegiatan yang dilakukan pada masa awal lebih difokuskan pada penimbangan balita, pemberian imunisasi, dan penyuluhan kesehatan dasar kepada masyarakat.

Seiring dengan berjalannya waktu, Posyandu di Desa Tanjung mengalami perkembangan baik dari segi jenis pelayanan maupun partisipasi masyarakat. Saat ini, kegiatan Posyandu dilaksanakan secara rutin satu kali dalam sebulan di lokasi yang telah ditentukan, seperti balai desa, rumah kader, atau fasilitas umum lainnya yang mudah dijangkau.

Pengelolaan kegiatan Posyandu di Desa Tanjung dilakukan oleh kader-kader Posyandu yang berasal dari masyarakat Desa Tanjung dan telah mendapatkan pembinaan dari tenaga kesehatan, khususnya bidan desa dan petugas puskesmas. Kader berperan aktif mulai dari tahap persiapan,

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pelaksanaan pelayanan, hingga pencatatan dan pelaporan kegiatan Posyandu.

Hingga saat ini, Posyandu di Desa Tanjung tetap aktif dan berperan penting sebagai sarana pelayanan kesehatan berbasis masyarakat sekaligus wadah pemberdayaan masyarakat dalam mendukung peningkatan derajat kesehatan, khususnya kesehatan ibu dan anak, di Desa Tanjung.

4.2.1 Visi Misi

A. Visi Posyandu Desa Tanjung Kecamatan Koto Kampar Hulu

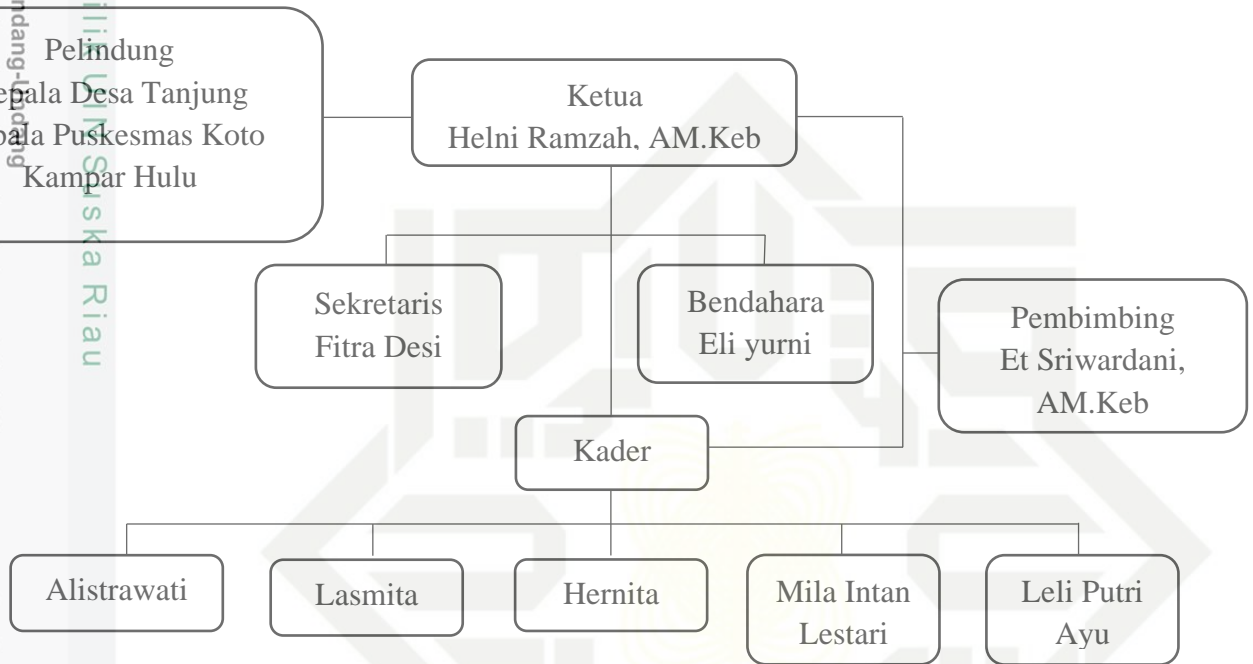
Terwujudnya masyarakat Desa Tanjung yang sehat, mandiri, dan sejahtera melalui pelayanan Posyandu yang aktif, terpadu, dan berkelanjutan.

B. Misi Posyandu Desa Tanjung Kecamatan Koto Kampar Hulu

1. Menyelenggarakan pelayanan kesehatan dasar yang berkualitas bagi seluruh sasaran Posyandu.
2. Mendorong partisipasi aktif masyarakat
3. Meningkatkan kapasitas dan peran kader Posyandu
4. Mewujudkan pengelolaan Posyandu yang tertib dan berkelanjutan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

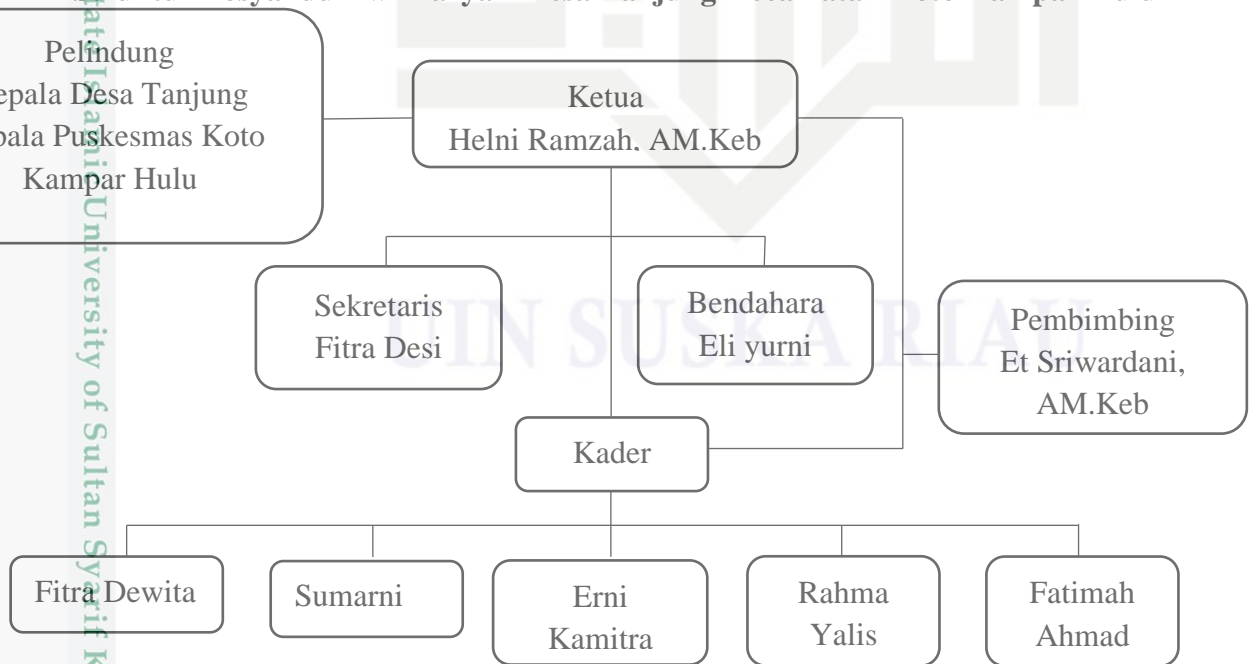
4.2.2 Struktur Posyandu Dwi Karya 1,2 dan 3 Desa Tanjung Kecamatan Koto Kampar Hulu

Gambar 4.1
Struktur Posyandu Dwi Karya 1 Desa Tanjung Kecamatan Koto Kampar Hulu



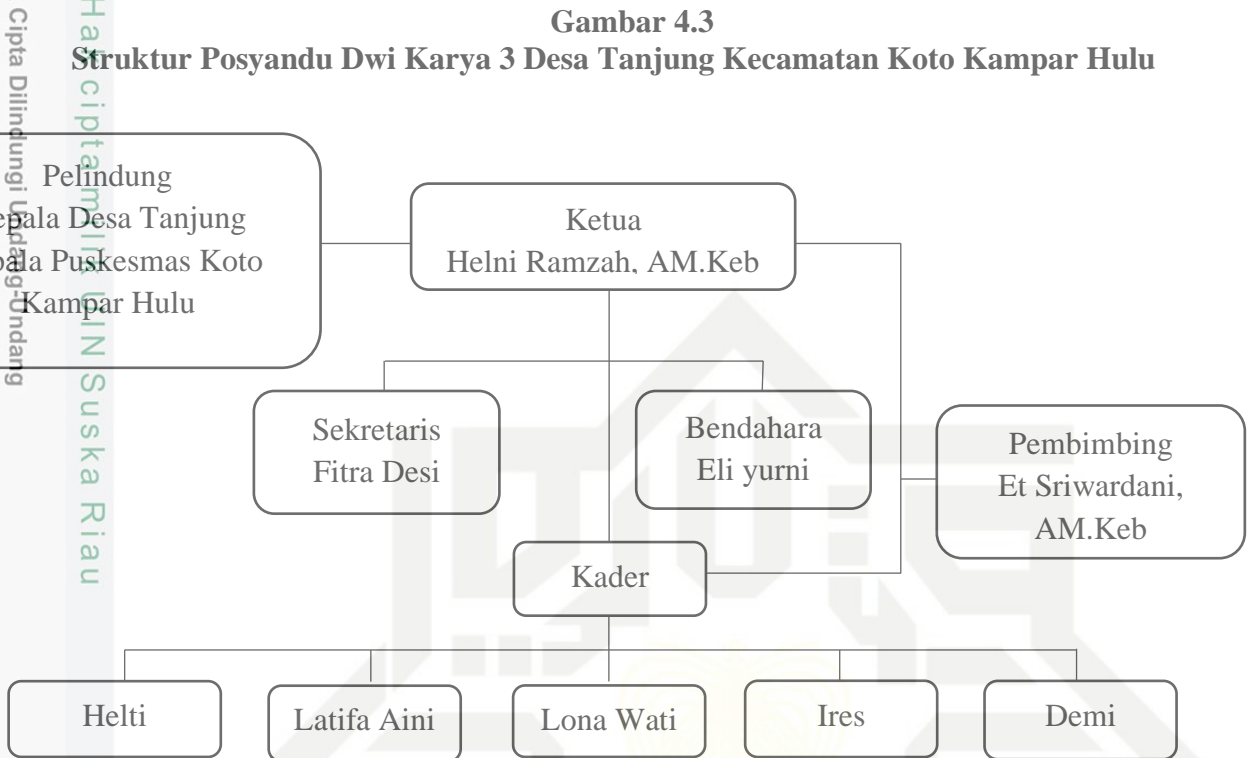
Sumber: Posyandu Dwi Karya 1

Gambar 4.2
Struktur Posyandu Dwi Karya 2 Desa Tanjung Kecamatan Koto Kampar Hulu



Sumber: Posyandu Dwi Karya 2

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang
1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Sumber: Posyandu Dwi Karya 3

4.2.3 Tugas Pokok dan Fungsi

A. Pelindung

Pelindung dalam struktur organisasi Posyandu Dwi Karya I Desa Tanjung terdiri dari Kepala Desa Tanjung dan Kepala Puskesmas Koto Kampar Hulu. Pelindung memiliki peran strategis dalam memberikan dukungan kebijakan, pembinaan, serta pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan Posyandu. Kepala Desa berperan dalam mendukung kebijakan di tingkat desa, khususnya terkait penganggaran, koordinasi kelembagaan, serta dukungan administratif. Sementara itu, Kepala Puskesmas berperan dalam pembinaan teknis dan pengawasan pelayanan kesehatan agar

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip, memperbanyak atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kegiatan Posyandu berjalan sesuai dengan standar pelayanan kesehatan yang berlaku. Keberadaan pelindung sangat penting dalam menjamin keberlanjutan program Posyandu serta memastikan kegiatan Posyandu terintegrasi dengan kebijakan kesehatan di tingkat desa dan kecamatan.

B. Ketua Posyandu

Ketua Posyandu merupakan pemimpin utama dalam pelaksanaan kegiatan Posyandu di tingkat desa. Ketua bertanggung jawab dalam mengoordinasikan seluruh kegiatan Posyandu, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi kegiatan. Ketua berperan sebagai penghubung antara kader Posyandu, bidan desa, dan pemerintah desa. Dalam pelaksanaan kegiatan, ketua mengatur pembagian tugas kader, memastikan kegiatan berjalan sesuai jadwal, serta mengawasi jalannya pelayanan Posyandu. Kepemimpinan ketua sangat menentukan kelancaran kegiatan Posyandu, terutama dalam menghadapi kendala di lapangan seperti keterbatasan fasilitas, jumlah kader, dan tingkat partisipasi masyarakat.

C. Sekretaris

Sekretaris Posyandu memiliki peran penting dalam pengelolaan administrasi kegiatan Posyandu. Sekretaris bertanggung jawab dalam pencatatan seluruh kegiatan Posyandu, pengelolaan dokumen, serta penyusunan laporan kegiatan. Selain

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

itu, sekretaris juga mengelola arsip administrasi seperti buku kegiatan, surat menyurat, dan data sasaran Posyandu. Peran sekretaris sangat mendukung kelancaran organisasi Posyandu karena administrasi yang tertib menjadi dasar dalam proses pelaporan dan pertanggungjawaban kegiatan Posyandu kepada pemerintah desa maupun pihak terkait lainnya.

D. Bendahara

Bendahara bertanggung jawab dalam pengelolaan keuangan Posyandu. Tugas bendahara meliputi pencatatan penerimaan dan pengeluaran dana Posyandu, pengelolaan dana operasional, serta penyusunan laporan keuangan. Bendahara berperan memastikan penggunaan dana Posyandu dilakukan secara transparan dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pengelolaan keuangan yang baik sangat berpengaruh terhadap kelangsungan kegiatan Posyandu, terutama dalam penyediaan kebutuhan operasional seperti Pemberian Makanan Tambahan (PMT), alat tulis, serta kebutuhan pendukung lainnya.

E. Pembimbing

Pembimbing dalam struktur Posyandu Dwi Karya I merupakan tenaga kesehatan, khususnya bidan desa atau petugas kesehatan yang ditunjuk. Pembimbing berperan dalam memberikan arahan teknis, pendampingan, serta pembinaan kepada kader Posyandu. Pembimbing juga bertanggung jawab dalam pelaksanaan

pelayanan kesehatan, seperti pemeriksaan kesehatan, imunisasi, serta penyuluhan kesehatan kepada masyarakat. Selain itu, pembimbing memastikan bahwa seluruh kegiatan Posyandu dilaksanakan sesuai dengan standar operasional prosedur (SOP) dan ketentuan pelayanan kesehatan yang berlaku.

F. Kader Posyandu

Kader Posyandu merupakan pelaksana utama kegiatan Posyandu di lapangan. Kader berperan dalam mempersiapkan kegiatan Posyandu, melakukan pendataan sasaran, membantu pelayanan kesehatan, serta menyampaikan informasi Posyandu kepada masyarakat. Dalam pelaksanaan kegiatan, kader membantu petugas kesehatan dalam penimbangan, pencatatan, penyuluhan, dan pelayanan lainnya. Keaktifan dan kemampuan kader sangat memengaruhi keberhasilan pelaksanaan Posyandu, karena kader merupakan pihak yang paling dekat dengan masyarakat dan menjadi ujung tombak pelayanan Posyandu di Desa Tanjung

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai Implementasi Program Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) di Desa Tanjung Kecamatan Koto Kampar Hulu, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan Program Posyandu belum berjalan secara maksimal. Hal ini dapat dilihat dari beberapa indikator implementasi kebijakan menurut Edward III yang masih menghadapi berbagai kendala dalam pelaksanaannya.

1. Pada indikator komunikasi, pelaksanaan Program Posyandu di Desa Tanjung telah berjalan melalui penyampaian informasi dari bidan desa kepada kader dan diteruskan kepada masyarakat. Namun, proses komunikasi tersebut belum sepenuhnya optimal karena penyampaian informasi belum merata dan masih terbatas pada kegiatan rutin. Selain itu, kejelasan informasi yang diterima masyarakat belum sepenuhnya dipahami, serta jadwal pelaksanaan yang belum konsisten berpotensi menimbulkan kebingungan. Kondisi ini berdampak pada tingkat pemahaman dan partisipasi masyarakat yang belum maksimal.
2. Pada indikator sumber daya, implementasi Program Posyandu di Desa Tanjung menunjukkan bahwa jumlah kader telah mencukupi sesuai standar minimal, namun dari sisi kualitas masih terbatas akibat pelatihan yang belum merata. Dari aspek informasi, pedoman pelaksanaan sebenarnya telah tersedia, namun belum dimanfaatkan secara optimal

karena kader lebih bergantung pada penjelasan lisan, sehingga tidak semua jenis pelayanan dipahami dan dilaksanakan. Selanjutnya, dari aspek wewenang, pembagian tugas telah jelas dan berjenjang antara pemerintah desa, bidan desa, dan kader, namun kader belum memiliki kewenangan untuk mengembangkan program secara mandiri di luar kegiatan rutin. Selain itu, dari aspek fasilitas, sarana dan prasarana yang tersedia belum sepenuhnya memadai dan belum sepenuhnya mendukung kelancaran kegiatan.

3. Disposisi atau sikap pelaksana dalam implementasi program Posyandu di Desa Tanjung Kecamatan Koto Kampar Hulu sudah cukup baik. Proses pengangkatan kader yang mempertimbangkan keaktifan dan kemauan menunjukkan adanya sikap positif terhadap pelaksanaan program, meskipun belum sepenuhnya berbasis standar kompetensi. Selain itu, pemberian insentif yang diterima kader Posyandu di Desa Tanjung berupa gaji sebesar Rp200.000 per bulan yang dicairkan setiap tiga bulan sekali, serta uang saku bagi kader yang mengikuti kegiatan pelatihan. Dari sisi ketepatan waktu, pemberian insentif tidak pernah mengalami keterlambatan.
4. Pada indikator struktur birokrasi, pelaksanaan Posyandu di Desa Tanjung telah mengacu pada pedoman dan SOP yang berlaku, sehingga kegiatan tetap berjalan secara teratur. Namun, penerapan SOP belum dilakukan secara maksimal karena tidak semua jenis pelayanan dalam pedoman dapat dilaksanakan di lapangan. Selain itu, koordinasi antar pelaksana

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan lintas sektor masih perlu ditingkatkan agar seluruh program Posyandu dapat dilaksanakan secara lebih efektif dan menyeluruh.

Beberapa faktor yang menjadi penghambat dalam implementasi Program Posyandu di Desa Tanjung Kecamatan Koto Kampar Hulu antara lain: (1) Kurangnya anggaran dalam pelaksanaan program posyandu, (2) Keterbatasan sarana dan prasarana, (3) Keterbatasan kompetensi dan pelatihan kader, (4) Kurangnya sosialisasi dan penyampaian informasi yang belum merata kepada masyarakat (5) Jadwal pelaksanaan posyandu yang tidak menetap, (6) Pencatatan dan pelaporan kegiatan posyandu yang masih bersifat manual. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa implementasi Program Posyandu di Desa Tanjung telah berjalan, namun belum maksimal dan masih memerlukan perbaikan pada berbagai aspek agar tujuan Program Posyandu dapat tercapai secara optimal.

6.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Implementasi Program Posyandu di Desa Tanjung Kecamatan Koto Kampar Hulu, masih ditemukan beberapa kendala yang mempengaruhi pelaksanaan program agar berjalan optimal. Oleh karena itu, peneliti memberikan beberapa saran sebagai bahan pertimbangan bagi pihak-pihak terkait, antara lain sebagai berikut:

1. Optimalisasi dukungan anggaran

Pemerintah desa diharapkan dapat mengoptimalkan alokasi anggaran untuk mendukung pelaksanaan Program Posyandu, baik melalui dana desa maupun sumber pendanaan lainnya. Anggaran tersebut dapat

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

digunakan untuk mendukung kegiatan sosialisasi, pengadaan sarana dan prasarana, pelatihan kader, serta pengembangan sistem pencatatan dan pelaporan. Dukungan anggaran yang memadai diharapkan dapat meningkatkan efektivitas dan keberlanjutan Program Posyandu di Desa Tanjung.

2. Peningkatan dukungan sarana dan prasarana

Disarankan agar pemerintah desa dan pihak terkait dapat memberikan dukungan sarana dan prasarana yang memadai, seperti kursi, meja, komputer serta fasilitas pendukung lainnya. Dukungan ini penting agar kegiatan Posyandu dapat berjalan lebih efektif dan efisien

3. Peningkatan kompetensi dan pemahaman kader

Perlu adanya pelatihan berkelanjutan bagi kader Posyandu, terutama terkait pengisian buku pencatatan, pelaporan kegiatan, serta pemahaman sasaran dan alur pelayanan Posyandu. Dengan meningkatnya kompetensi kader, pelaksanaan kegiatan dapat berjalan lebih tertib dan sesuai dengan pedoman yang berlaku.

4. Peningkatan sosialisasi dan penyebaran informasi

Puskesmas bersama Bidan Desa dan pemerintah desa diharapkan dapat meningkatkan sosialisasi Program Posyandu secara lebih terencana dan merata kepada seluruh lapisan masyarakat. Sosialisasi tidak hanya dilakukan secara lisan atau melalui WhatsApp, tetapi juga dapat menggunakan media lain seperti pengumuman tertulis, papan informasi desa, serta penyampaian langsung melalui kegiatan masyarakat agar

informasi dapat menjangkau warga yang tidak memiliki akses komunikasi.

5. Penetapan jadwal posyandu yang lebih teratur

Disarankan agar jadwal pelaksanaan Posyandu ditetapkan secara lebih tetap dan konsisten setiap bulannya. Jadwal yang jelas dan tidak sering berubah akan memudahkan masyarakat dalam mengingat serta menyesuaikan waktu untuk hadir, sehingga diharapkan dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kegiatan Posyandu.

6. Pengembangan sistem pencatatan dan pelaporan

Pemerintah desa dan pihak Puskesmas diharapkan dapat mendorong pemanfaatan sistem pencatatan dan pelaporan berbasis digital secara bertahap, tidak hanya untuk balita tetapi juga untuk sasaran lainnya seperti ibu hamil, usia remaja, usia dewasa, dan lansia. Hal ini bertujuan untuk mengurangi beban kerja kader, meminimalisir kesalahan pencatatan, serta meningkatkan akurasi data.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an

Q.S AnNisa/3:9

Q.S Al-Maidah/5:2

Buku

Agustino, Leo. 2017. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik (Edisi Revisi)*. Bandung: alfabeta.

Arafat, A. (2023). *Kebijakan PubTeori dan Praktik*. Malang: PT Literasi Nusantara Abadi.

Dewi, D. S. K. (2022). *Buku Ajar Kebijakan Publik Proses, Implementasi dan Evaluasi*.

Kemenkes, R. I. (2023). *Panduan Pengelolaan Posyandu Bidang Kesehatan*. Jakarta: Kemenkes RI.

Nugroho, R. (2014). *Kebijakan publik di negara-negara berkembang*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Rahardian, R. (2022). *Studi Kebijakan Publik: Teori, Proses dan Isu Kontemporer*. Yogyakarta: Deepublish

Sore, U.B Dan Sobirin. (2017). *Kebijakan Publik*. Makassar: CV SAH MEDIA

Suaib, M.R. (2016). *Pengantar Kebijakan Publik Dari Administrasi Negara, Kebijakan Publik, Administrasi Publik, Good Governance, Hingga Implementasi Kebijakan*. Yogyakarta : Calpulis

Sugiyono. (2019). *Metodelogi Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif Dan R&D*. Bandung:Alfabeta

Syahrudin, S. E. (2019). *Implementasi Kebijakan Publik: Konsep, Teori dan Studi Kasus*. Nusamedia.

Thoha, M. (2005). *Dimensi-Dimensi Prima Ilmu Administrasi Negara (1st Ed.)*. Pt. Raja Grafindo Persada.

Tesiana, N., & Duadji, N. (2019). *Implementasi dan evaluasi kebijakan publik*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

Peraturan Perundang-Undangan

Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/Menkes/2015/2023 Tentang Petunjuk Teknis Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer

Peraturan Bupati Kampar Nomor 3 Tahun 2024 tentang Percepatan Penurunan Stunting

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2011 Pedoman Pengintegrasian Layanan Sosial Dasar Di Pos Pelayanan Terpadu

Permendagri Nomor 13 Tahun 2024 tentang Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu)

Permendagri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa Dan Lembaga Adat Di Desa

Jurnal

Afrizal, R. (2022). Penguatan Kader Posyandu Dalam Upaya Peningkatan Pelayanan Posyandu Balita di Masa Pandemi Covid 19. *Journal of Public Health and Community Service*, 1(2), 80-84.

Amrina, A. F., Ramadhan, B. F., Amar, N. K., Fauzi, I. A., & Levi, S. (2020). Pelaksanaan Kegiatan Posyandu pada Masa Pandemi COvid-19 Sebagai Upaya Pemenuhan Hak Balita dan Ibu Hamil Sesuai dengan Rekomendasi Kementerian Kesehatan Republik Indonesia di Desa Bongkok kecamatan Kramat Kabupaten Tegal. *KKN UNNES BMC*. https://kkn.unnes.ac.id/lapkknunes/32004_3328152014_6_DesaBongkok_20200907_142435.pdf.

Adiani, N. K. D., Maba, I. W., Arnawa, I. K., & Sudipa, I. N. (2025). Strategi Penguatan Implementasi Program Posyandu di Wilayah Kerja UPTD Puskesmas II Dinas Kesehatan Kecamatan Denpasar Utara: Strategy for Strengthening the Implementation of the Posyandu Program in the Working Area of UPTD Puskesmas II North Denpasar District Health Office. *Jurnal Alam Lestari*, 10(1), 23-32.

Fitri, N. L., Usiono, U., Adha, C., Izzatunnisa, I., & Nasution, S. F. (2023). Pentingnya penerapan komunikasi efektif dalam konteks pendidikan. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 3(6), 5241-5251.

Ilhas, A. N. K. (2017). Peran Posyandu Lansia dalam meningkatkan kesejahteraan lanjut usia di posyandu lansia sejahtera Kelurahan Pasirmuncang. *Jurnal Eksistensi Pendidikan Luar Sekolah (E-Plus)*, 2(2).

Indah Sari, N., & Indrawati, F. (2021). Analisis Implementasi Program Posyandu Balita Di Wilayah Kerja Puskesmas Sidorejo Kidul Kota Salatiga Analysis of Implementation of Toddler Posyandu Program in The Working Ar-

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ea of Sidorejo Kidul Primary Health Center Salatiga City. *Jurnal Ilmu Kesehatan Masyarakat Berkala*, 3(1), 19-29.

Isnaini, M., Aidha, Z., Khairunnisa, K., & Siregar, N. Y. (2024). Analisis implementasi program posyandu di desa kolam kecamatan percut sei tuan. *Jurnal ilmiah publika*, 11(1), 221.

Iswarawanti, D. N. (2010). Kader posyandu: peranan dan tantangan pemberdayaannya dalam usaha peningkatan gizi anak di Indonesia. *Jurnal manajemen pelayanan kesehatan*, 13(4), 169-173.

Izazi, D., Eritiana, E., Pasha, D., & Puspaningrum, A. S. (2022). E-Posyandu Pengolahan Data Status Tumbuh Kembang Pada Balita (Studi kasus: Posyandu Cahaya Kartini). *Jurnal Teknologi Dan Sistem Informasi (JTISI)*, 3(1), 27-33.

Lorita, E., Saputra, HE, & Anggraini, F. (2023). Analisis Implementasi Kebijakan Pelayanan Posyandu di Desa Lawang Agung. *Jurnal Penelitian Ilmu Sosial dan Humaniora*, 3 (1).

Mukarramah. (2020). Hubungan Pengetahuan Dan Sikap Remaja Putri Terhadap Perilaku Personal Hygiene Saat Menstruasi. *Jurnal Kesehatan Luwu Raya*, 7(1), 88-95.

Rachmadini, A. D., & Mukminin, A. (2025). Pengaruh Pelatihan Kader Posyadu pada pelaksanaan Posyandu Sahabat Masyarakat di Klaten. *Riwayat: Educational Journal of History and Humanities*, 8(2), 982-994.

Rahmanindar, N., Nisa, J., & Izah, N. (2019). Implementasi Program Posyandu Tfc (Theurapetic Feeding Center) Sebagai Strategis Penuntasan Dan Pemulihan Gizi Buruk Bagi Balita Di Puskesmas Bumijawa Kabupaten Tegal. *DINAMIKA KESEHATAN: JURNAL KEBIDANAN DAN KEPERAWATAN*, 10(2), 773-782.

Siswati, T., Olfah, Y., Attawet, J., Nurhidayat, N., & Waris, L. (2023). Menilai Kesiapan Kader Posyandu Dalam Mengimplementasikan Pelayanan Kesehatan Primer Terpadu Di Yogyakarta, Indonesia. *Jurnal Administrasi Kesehatan Indonesia* 13(1), 44-57.

Ulfah, I. F., & Nugroho, A. B. (2020). Menilik Tantangan Pembangunan Kesehatan di Indonesia: Faktor Penyebab Stunting di Kabupaten Jember. *Jurnal Sosial Politik*, 6(2), 201-213.

Wahiddinor, W., Jumaidi, J., & Arsyad, M. (2024). Implementasi Program Posyandu Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Hulu Sungai Utara Studi Kasus Kecamatan Amuntai Utara (Upt Puskesmas Sungai Turak Dan Guntung. *Jurnal Kebijakan Publik*, 1(2), 252-259

Wumu, A. M., Dengo, S., & Londa, V. (2022). Komunikasi Kebijakan Dalam

Pelaksanaan Dana Desa Di Desa Watudambo II Kecamatan Kauditan Kabupaten Minahasa Utara. *Jurnal Administrasi Publik*, 8(113).

Website

Badan Pusat Statistik Kabupaten Kampar. (2024). *Kabupaten Kampar Dalam angka 2024*. Diakses pada 17 September 2025 dari <https://kamparkab.bps.go.id/id/publication/2025/02/28/c2398f34858c851e102a8ba0/kabupaten-kampar-dalam-angka-2025.html>

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



LAMPIRAN

Lampiran 1

PEDOMAN WAWANCARA PENELITIAN

IMPLEMENTASI PROGRAM POS PELAYANAN TERPADU (POSYANDU) DI DESA TANJUNG KECAMATAN KOTO KAMPAR

HULU

INFORMAN: 1. Kepala Desa
2. Bidan Desa
3. Kader Posyandu

1. Komunikasi

- a. Bagaimana proses penyampaian informasi kegiatan Posyandu?
- b. Media apa saja yang digunakan dalam menyampaikan informasi Posyandu?
- c. Seberapa sering komunikasi atau sosialisasi Posyandu dilakukan?
- d. Apakah informasi yang disampaikan mudah dipahami dan sudah jelas?
- e. Apakah pernah terjadi kesalahpahaman terkait pelaksanaan kegiatan Posyandu?
- f. Apakah pembagian tugas antar kader dan petugas kesehatan dalam pelaksanaan Posyandu sudah jelas?
- g. Apakah jadwal Posyandu dilaksanakan secara rutin dan konsisten setiap bulan?
- h. Apakah pernah terjadi perubahan jadwal atau kegiatan secara mendadak?

2. Sumber daya

- a. Berapa jumlah kader Posyandu dan petugas kesehatan yang terlibat dalam

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pelaksanaan Posyandu?

- b. Apakah kader memahami tugas dan tanggung jawab masing-masing?
- c. Apakah kader Posyandu pernah mendapatkan pelatihan terkait pelayanan Posyandu?
- d. Pelatihan apa saja yang pernah diikuti oleh kader?
- e. Apakah kader pernah mendapatkan pelatihan terkait skrining anemia, PPOK, pemeriksaan indera, atau kesehatan jiwa?
- f. Apakah dalam pelaksanaan kegiatan Posyandu, kader sudah menjalankan tugas sesuai dengan arahan dan pedoman yang telah ditetapkan?
- g. Apakah tersedia informasi atau pedoman tertulis tentang pelaksanaan posyandu?
- h. Apakah kader memahami semua jenis kegiatan yang harus dilakukan di Posyandu?
- i. Apakah ada kegiatan yang tidak dilakukan karena tidak tahu caranya?
- j. Apakah pencatatan dan pelaporan kegiatan Posyandu masih dilakukan secara manual?
- k. Siapa yang berhak mengambil keputusan terkait pelaksanaan Posyandu ?
- l. Bagaimana pembagian wewenang antara pemerintah desa, bidan desa, dan kader Posyandu dalam pelaksanaan kegiatan Posyandu?
- m. Bagaimana proses pengambilan keputusan apabila terjadi kendala saat pelaksanaan Posyandu?
- n. Apa saja tugas kader dalam kegiatan Posyandu?

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- o. Apakah kader memiliki kewenangan untuk menambah atau mengembangkan kegiatan Posyandu?
- p. Apakah kader bisa mengambil keputusan sendiri dalam pelaksanaan kegiatan?
- q. Apakah fasilitas Posyandu sudah memadai untuk mendukung pelayanan?
- r. Apa saja fasilitas yang masih kurang?
- s. Apakah dana yang tersedia mencukupi untuk seluruh kegiatan Posyandu?
- t. Kegiatan apa saja yang terhenti akibat keterbatasan dana?

3. Disposisi

- a. Bagaimana proses pemilihan atau pengangkatan bidan desa dan kader posyandu di desa tanjung?
- b. Apakah pengangkatan kader sesuai dengan kemampuan dan kemauan mereka?
- c. Apa jenis insentif yang diterima kader Posyandu dan apakah menurut Anda insentif tersebut sudah memadai?
- d. apakah pernah terjadi keterlambatan atau kekurangan insentif?

4. Pengangkatan Birokrat

- a. Apakah terdapat SOP tertulis dalam pelaksanaan kegiatan Posyandu?
- b. Apakah pelaksanaan kegiatan posyandu sudah sesuai dengan SOP?
- c. Apakah terdapat SOP yang mengatur tentang pencatatan dan pelaporan kegiatan Posyandu?
- d. Bagaimana pembagian tugas antar pihak dalam pelaksanaan Posyandu?
- e. Apakah koordinasi antar pihak berjalan dengan baik?

- f. Apakah pernah terjadi tumpang tindih tugas atau kurangnya koordinasi?

INFORMAN: Masyarakat

- a. Apakah ibu mengetahui adanya kegiatan Posyandu dan dari mana Ibu mengetahui informasi tentang kegiatan Posyandu?
- b. Apakah informasi mengenai jadwal Posyandu disampaikan dengan jelas?
- c. Apakah ibu pernah tidak mengetahui jadwal Posyandu? Mengapa?
- d. Menurut ibu, apakah penyampaian informasi dari kader sudah merata kepada masyarakat?
- e. Bagaimana cara penyampaian informasi yang paling sering digunakan (lisan, WA, pengumuman, dll)?
- f. Apakah menurut ibu informasi yang diberikan sudah mudah dipahami?
- g. Apakah ibu pernah mengalami kendala saat mendapatkan pelayanan?
- h. Bagaimana sikap kader Posyandu saat memberikan pelayanan?
- i. Apakah kegiatan Posyandu dilaksanakan secara rutin setiap bulan?
- j. Apakah jadwal Posyandu tetap atau sering berubah?
- k. Apakah ibu rutin mengikuti kegiatan Posyandu?

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Lampiran 2

Dokumentasi Wawancara



Wawancara dengan Kepala Desa Tanjung dan Bidan Desa Tanjung



Wawancara dengan Kader Posyandu Dwi Karya1,2 dan 3

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau



Wawancara dengan masyarakat yang mengikuti Posyandu Dwi Karya



Wawancara dengan masyarakat yang mengikuti Posyandu Dwi Karya

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Lampiran 3

SK Pembimbing Proposal

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
 كلية العلوم الاقتصادية و الاجتماعية
FACULTY OF ECONOMICS AND SOCIAL SCIENCES
 Jl. H.R. Soebrantas No.155 KM.15 Tuahmadani Tampan, Pekanbaru 28298 PO.Box 1004 Telp. 0761-562051
 Fax. 0761-562052 Web www.uin-suska.ac.id, E-mail fekonso@uin-suska.ac.id

Nomor : B-6223/Un.04/F.VII.1/PP.00.9/09/2025	29 September 2025
Sifat : Biasa	
Lampiran : -	
Perihal : <u>Penunjukkan Dosen Pembimbing Proposal</u>	

Yth. **Dr. Kamaruddin, S.Sos., M.Si.**
 Dosen Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial
 UIN Sultan Syarif Kasim Riau
 Pekanbaru

Assalamu'alaikum Wr. Wb.
 Dengan hormat, bersama ini disampaikan kepada Saudara bahwa mahasiswa:

Nama	: Reva Lina
NIM	: 12270521443
Prodi	: Administrasi Negara S1
Semester	: VII (tujuh)

benar dalam menyelesaikan Proposal Penelitian dengan Judul : **"IMPLEMENTASI PROGRAM POSYANDU BAGI LANSIA DALAM UPAYA MENINGKATKAN KESEHATAN LANSIA DI DESA TANJUNG KECAMATAN KOTO KAMPAR HULU"**. Sehubungan dengan hal di atas, Saudara ditunjuk sebagai Pembimbing Proposal Penelitian mahasiswa tersebut.

Demikian disampaikan, atas bantuan Saudara diucapkan terimakasih.

Wassalam
 a.n. Dekan,
 Wakil Dekan I




Dr. Nurlasera, S.E. M.Si.
 NIP. 19730601 200710 2 003

Tembusan :
 Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau

Dokumen ini telah dilanda tangani secara elektronik.
 Token : lyda4688

SK Pembimbing Skripsi



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
كلية العلوم الاقتصادية و الاجتماعية
FACULTY OF ECONOMICS AND SOCIAL SCIENCES
 Jl. H.R. Soebrantas No.155 KM.15 Tuahmadam Tampan, Pekanbaru 28298 P.O. Box. 1004 Telp. 0761-562051
 Fax. 0761-562052 Web: www.uin-suska.ac.id, E-mail: fekonso@uin-suska.ac.id

Nomor : B-840/Un.04/F.VII.1/PP.00.9/01/2026 29 Januari 2026
 Sifat : Biasa
 Lampiran : -
 Perihal : **Bimbingan Skripsi!**

Yth. **Dr. Kamaruddin, S.Sos., M.Si.**
 Dosen Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial
 UIN Sultan Syarif Kasim Riau
 Pekanbaru

Assalamu'alaikum Wr. Wb.


Dengan hormat, bersama ini kami sampaikan kepada Saudara bahwa :

N a m a : Reva Lina
 NIM : 12270521443
 Jurusan : Administrasi Negara
 Semester : VII (tujuh)

adalah mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memenuhi syarat untuk menyusun skripsi dengan judul : **IMPLEMENTASI PROGRAM POS PELAYANAN TERPADU (POSYANDU) DI DESA TANJUNG KECAMATAN KOTO KAMPAR HULU**. Sehubungan dengan hal di atas, Saudara ditunjuk sebagai Pembimbing Skripsi mahasiswa tersebut.

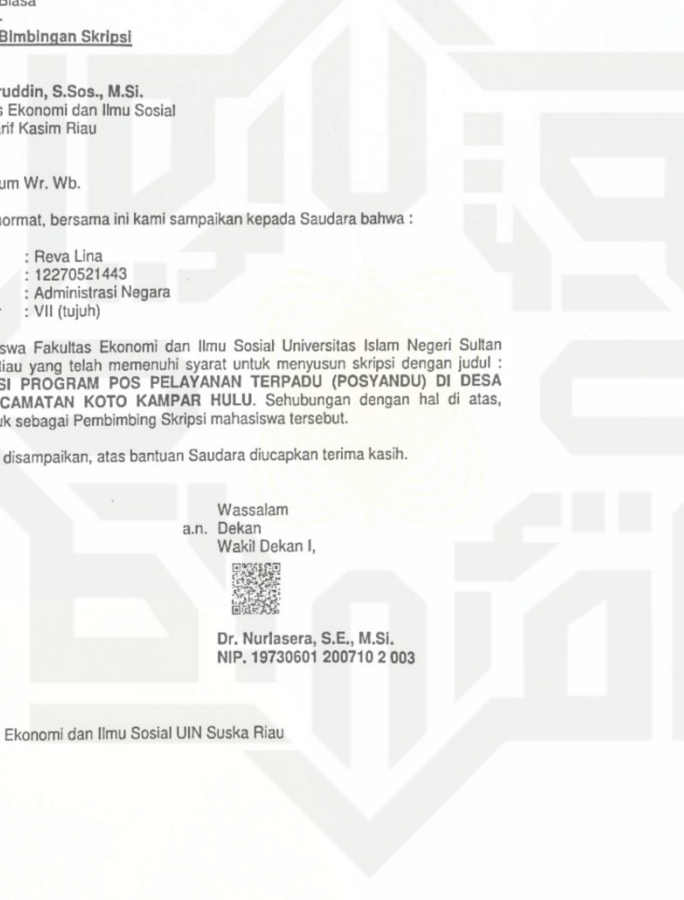
Demikian disampaikan, atas bantuan Saudara diucapkan terima kasih.

Wassalam
 a.n. Dekan
 Wakil Dekan I,




Dr. Nurlasera, S.E., M.Si.
 NIP. 19730601 200710 2 003

Tembusan :
 Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau



UIN SUSKA RIAU

 Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BBSrE).
 Token : e69rzq5r

- Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Surat Izin Riset



Nomor : B-8196/Un.04/F.VII/PP.00.9/12/2025 15 Desember 2025
 Sifat : Biasa
 Lampiran : -
 Hal : **Mohon Izin Riset**

Yth: Ketua Posyandu
 Dwi Karya 1,2 dan 3
 Jl. Raya Pasar Tanjung No 01
 Kecamatan Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar
 Provinsi Riau 28453.

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dengan ini menyampaikan bahwa mahasiswa :

Nama : Reva Lina
 NIM. : 12270521443
 Jurusan : Administrasi Negara
 Semester : VII (Tujuh)

bermaksud melakukan **Riset** di tempat Bapak/Ibu dengan judul: "**Implementasi Program Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) di Desa Tanjung Kecamatan Koto Kampar Hulu**". Untuk itu kami mohon Bapak/Ibu berkenan memberikan izin **Riset** dan bantuan data dalam rangka penyelesaian penulisan skripsi mahasiswa tersebut.

Demikianlah, atas bantuan dan kerjasama Bapak/Ibu diucapkan terima kasih.

Dekan,



Dr. Desrir Miftah, S.E., M.M., Ak
 NIP. 19740412 200604 2 002

UIN SUSKA RIAU



Dokumen ini telah diandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BBSrE).

Token : bEAJITM

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Surat Selesai Melaksanakan Riset



PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR
KECAMATAN KOTO KAMPAR HULU
DESA TANJUNG

JL. PASAR TANJUNG No. 01

Kode Pos 28453

Nomor	: 420/TJ-KTKH/2026/17	Tanjung, 16 Desember 2025
Lampiran	: -	Kepada Yth,
Penhal	: Surat Selesai Melaksanakan Riset	Dekan Fakultas Ilmu Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
		di- Tempat

Dengan Hormat,

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : NASRULLAH, S.Sos
 Jabatan : Kepala Desa Tanjung

Menerangkan bahwa:

Nama : Revalina
 NIM : 12270521443
 Semester : 8 / 2026
 Program Studi : Administrasi Negara
 Fakultas : Fakultas Ilmu Ekonomi dan Ilmu Sosial

Telah selesai melaksanakan Riset dari tanggal 15 Desember 2025 – 09 Januari 2026 di Pemerintahan Desa Tanjung Kecamatan Koto Kampar Hulu sebagai syarat penyusunan penelitian.

Demikian surat ini kami sampaikan, dan atas kerjasamanya kami mengucapkan terima kasih.





BIODATA PENULIS

Reva Lina. Lahir di Desa Tanjung, 09 Januari 2004. Anak pertama dari dua bersaudara dari pasangan Bapak Jaafar dan Ibu Neti. pada tahun 2016 penulis menyelesaikan pendidikan Sekolah Dasar (SD) di SDN 001 Tanjung, menyelesaikan pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) di SMPN 1 Koto Kampar Hulu. Kemudian pada tahun 2022 penulis menyelesaikan pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA) di SMAN 1 Koto Kampar Hulu. Pada tahun 2022 penulis melanjutkan studi di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial, Jurusan Administrasi Negara jenjang strata 1 (S1). Pada tahun 2025 penulis melaksanakan Praktek Kerja Lapangan (PKL) di Dinas Sosial Kabupaten Kampar, kemudian pada tahun yang sama penulis melakukan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Pulau Beralo Kecamatan Kuantan Hilir Seberang Kabupaten Kuansing. Penulis melakukan penelitian di Desa Tanjung Kecamatan Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar dengan judul **“Implementasi Program Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) Di Desa Tanjung Kecamatan Koto Kampar Hulu”**. Dibawah bimbingan Bapak Dr. Kamaruddin, S.Sos, M.Si Penulis mengikuti ujian Manaqasah pada hari Selasa, 21 April 2026 kemudian dinyatakan lulus dan memperoleh gelar Sarjana Sosial (S.Sos).

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.